

BAB II

PENGUSAHA SHANGHAI SEBELUM MASA PEMERINTAH NANJING

2.1 Sejarah dan Perkembangan Pengusaha Shanghai

Pada tahun 1927-1933 sulit untuk benar-benar mengelompokkan pengusaha Shanghai ke dalam satu kategori yang jelas seperti bankir, pedagang, industrialis, ataupun pedagang perantara. Hal ini disebabkan karena banyak pengusaha Shanghai yang memiliki lebih dari satu bidang profesi. Salah satu contohnya adalah industrialis Rong Zongjing (荣宗敬) yang juga merupakan direktur dari bank modern. Selain itu, Yu Xiaqing (虞洽卿), pemimpin utama grup Zhejiang (Zhèjiāng xì 浙江系), juga merupakan manager utama dari Perusahaan Kapal Uap San Bei (Sānběi Gōngsī 三北公司), pedagang perantara bagi Bank Masyarakat Perdagangan Netherlands, *manager* dari Bursa Efek Shanghai (Wùpǐn Zhèngquàn Jiāoyìsuǒ 物品证券交易所), pengawas dari Bank Penyimpanan dan Perdagangan Siming (Simíng Shāngyè Chúxù Yínháng 四明商业储蓄银行), dan pada tahun 1925 merupakan pemimpin dari Kamar Dagang Shanghai (Shànghǎi Zǒngshānghuì 上海总商会) (Jones, 1996: 369). Walaupun demikian, untuk mempermudah menelusuri sejarah dan perkembangan pengusaha Shanghai maka akan dijelaskan ke dalam tiga sektor, yaitu sektor perdagangan, perindustrian, dan perbankan.

2.1.1 Sektor Perdagangan

Jauh sebelum Shanghai dibuka secara resmi untuk perdagangan dengan barat pada bulan November 1843 oleh perjanjian Nanjing, para pedagang Shanghai telah terlibat dalam ekspor-impor gelap. Opium dan barang asing lainnya ditransfer ke Shanghai dari Fujian (福建) dan Guangdong (广东) untuk dikirim ke seluruh bagian wilayah Jiangnan (江南). Di sisi lain, teh dan sutra sampai di Shanghai dari propinsi-propinsi yang bertetangga dengan Shanghai untuk dibawa ke luar negeri. Skala perdagangan di Shanghai saat itu masih tergolong kecil. Setelah Shanghai dibuka sebagai *treaty port* pada tahun 1843,

kota ini langsung menggantikan Guangzhou (广州) sebagai pelabuhan komersial terpenting di Cina (Xu Xiaoqun, 2001: 25).

Setelah sistem Cohong (gōngháng 公行)¹ dilarang dalam perjanjian Nanjing, para pedagang asing memiliki kebebasan untuk menjalankan bisnisnya di pasar Cina (Spence, 1990: 159). Perdagangan di Shanghai saat itu sebagian besar ditangani oleh firma asing (yángháng 洋行). Walaupun demikian mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa Cina, cara berbisnis masyarakat setempat, dan kondisi pasar lokal. Oleh karena itu, mereka menyewa pedagang perantara (mǎibàn 买办) dan penerjemah (tōngshì 通事) untuk membantu mereka dalam menjalankan hubungan bisnis dengan pedagang setempat. Kelompok pedagang perantara ini mendapatkan keuntungan yang banyak dan menggunakan hubungan dengan pengusaha asing untuk menjalankan bisnis mereka sendiri (Hao Yen-p'ing, 1996: 276). Berkat perannya sebagai perantara, pedagang perantara menjadi salah satu kelompok terkaya yang memiliki bisnis yang sangat berpengaruh di Shanghai. Hal ini disebabkan karena selain memiliki pengetahuan tentang bisnis orang Cina, mereka juga memahami bagaimana cara orang asing berbisnis (Lee B.Y., *The China Weekly Review* 27 April 1929). Sebagian besar pengusaha Shanghai memiliki latar belakang sebagai pedagang perantara semacam ini.

Selain kelompok pedagang perantara, firma yang didirikan oleh pengusaha Cina, yang disebut yángzhuāng (洋庄) dan bank lokal juga mendapatkan keuntungan dengan adanya firma asing. Yangzhuang merupakan firma yang berurusan dengan komoditi asing dan memiliki spesialisasi dalam transaksi borongan antara pedagang asing dengan penduduk Cina di pedalaman. Sedangkan, bank lokal atau disebut sebagai qiánzhuāng (钱庄) mengeluarkan surat pinjaman yang berguna untuk transaksi antara pedagang asing dengan pedagang Cina. Pada tahun 1876, di Shanghai terdapat lebih dari seribu bank lokal

¹ Cohong merupakan monopoli ekspor-impor yang dilakukan oleh pedagang Cina di Guangzhou. Selama hampir satu abad sebelum perang candu pertama, hubungan perdagangan antara Cina dan Barat hanya dilakukan melalui sistem Cohong. Pedagang-pedagang Guangzhou yang tergabung dalam Cohong ini diberikan kekuasaan oleh pemerintah Qing untuk menangani perdagangan Cina, khususnya perdagangan teh dan sutra, dengan Barat. Mereka merupakan satu-satunya kelompok pedagang yang diberikan kekuasaan semacam ini pada masa itu. Hal ini membuat mereka menjadi pengendali perdagangan asing di Cina.

di daerah konsesi asing dan wilayah orang Cina. Banyak transaksi berbagai komoditi bergantung pada surat perjanjian yang dikeluarkan oleh bank-bank tersebut. Tanpa surat perjanjian ini, para pedagang asing yang baru tiba di Shanghai akan mengalami kesulitan untuk membeli barang-barang. Karena perannya yang begitu penting dalam perekonomian Shanghai, bank lokal dapat mendatangkan keuntungan yang besar (Xu Xiaoqun, 2001: 26).

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul yangzhuang jenis baru. Yangzhuang jenis baru ini terkait dengan urusan ekspor-impor secara langsung, tanpa melalui firma asing. Pada pertengahan tahun 1930-an jumlah firma semacam ini mencapai tiga ribu dan meliputi sekitar 30% dari keseluruhan jumlah firma yang ada di Shanghai. Firma-firma ini selain dijalankan dan diatur selayaknya perusahaan gaya barat. Selain itu, juga didasari oleh aturan dan teknik yang mereka pelajari dari pedagang asing. Pemilik firma ini pada umumnya merupakan mantan pedagang perantara yanghang dan pedagang yangzhuang jenis lama.

Sektor perdagangan selain merupakan alat pembangkit modernisasi Shanghai yang utama, juga merupakan kekuatan utama yang memunculkan perusahaan modern dan pengusaha modern. Dengan adanya firma asing juga telah memunculkan kelompok pedagang perantara yang merupakan cikal bakal dari pengusaha lokal Shanghai. Melalui kelompok pedagang perantara dan pengusaha lokal ini maka akan berkembang pengusaha Shanghai pada dekade awal abad dua puluh (Xu Xiaoqun, 2001: 26).

2.1.2 Sektor Perindustrian

Selain sektor perdagangan yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sektor perindustrian di Shanghai juga mengalami kemajuan yang pesat. Ada tiga faktor yang mendorong perkembangan industri di Shanghai. Selain hubungan yang sangat intensif dengan barat, tersedianya prasarana seperti jalur kereta api telah mendorong perkembangan industri di Shanghai. Selain itu, penyediaan energi listrik dengan harga yang murah menyebabkan perkembangan yang sangat signifikan terhadap perindustrian di Shanghai. Tanpa jalur kereta api Shanghai-Nanjing dan Shanghai-Hangzhou-Ningbo, perkembangan industri di

Shanghai tidak akan sedemikian maju. Selain itu, keberadaan Perusahaan Energi Shanghai dan tiga pembangkit listrik yang ada di kota tersebut merupakan faktor yang sangat penting yang mendukung perindustrian di Shanghai. Posisi Shanghai yang terletak di mulut sungai Yangzi juga merupakan faktor penarik bagi orang asing untuk mendirikan berbagai industri di Shanghai (Lieu, 1936: 9-11).

Industri manufaktur di Shanghai muncul pada masa Gerakan Memperkuat Diri (Yángwù Yùndòng 洋务运动 / Zìqiáng Yùndòng 自强运动)² pada tahun 1860an. Pendirian Gudang senjata Jiangnan (1865), Perusahaan Navigasi Uap Niaga Cina (1873), dan Pabrik Mesin Tenun Shanghai (1878) menandai awal berkembangnya Shanghai menjadi kota industri (Orchard, 1936: 25). Karena faktor pengelolaan yang rendah dan kompetisi dengan pengusaha asing, hanya sedikit perusahaan manufaktur Cina yang meraih sukses.

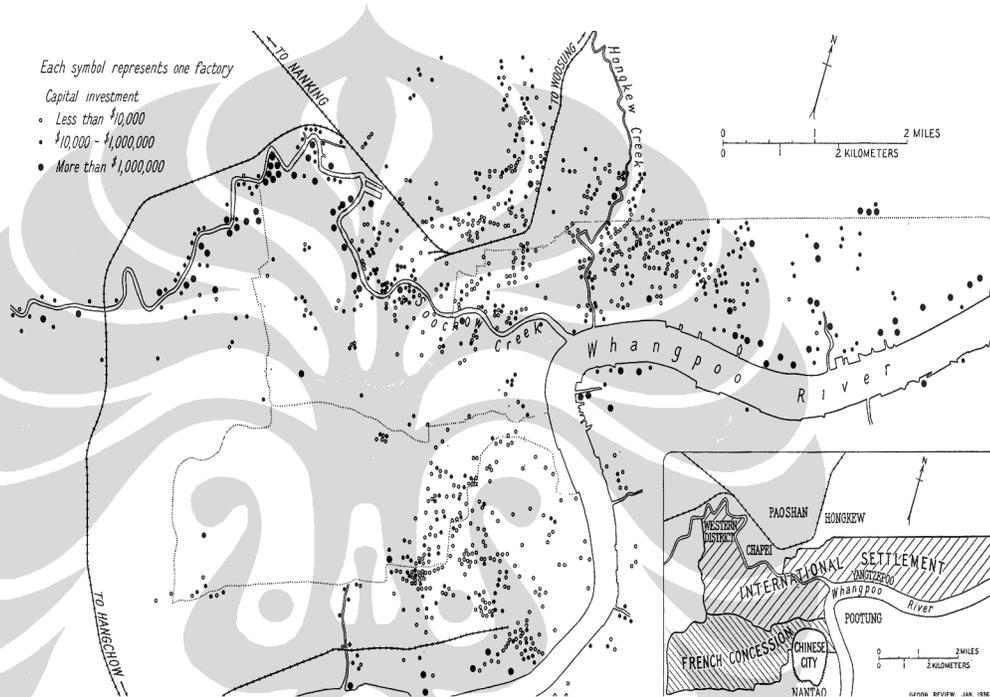
Kekalahan Cina dalam perang Cina-Jepang tahun 1894-1895 ternyata menyebabkan terjadinya transformasi dalam perekonomian Cina. Di satu sisi perjanjian Shimonoseki (Mǎguān tiáoyuē 马关条约) mengizinkan orang Jepang dan orang Barat untuk membangun industri di *treaty ports*. Hal ini memicu datangnya banyak orang asing untuk membangun industri di Shanghai. Di sisi lain, kekalahan dan penghinaan nasional yang dialami Cina mendorong para pengusaha Cina untuk membangun industri nasional. Tujuan yang bersifat nasionalis ini disertai dengan perhitungan bisnis yang digunakan oleh para pengusaha Cina untuk berkompetisi dengan para pengusaha asing.

Walaupun mengalami kompetisi dengan industri asing, para pengusaha Cina mulai berinvestasi dalam industri modern. Para pengusaha Cina menggunakan sumber daya yang mereka miliki dengan baik untuk membangun industri mereka. Sumber daya tersebut yaitu upah tenaga kerja yang rendah dan pengetahuan akan pasar lokal. Dengan modal yang terbatas dan akses teknologi yang masih rendah, para industrialis di Shanghai mulai berkonsentrasi pada produksi dengan kualitas rendah namun menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 1895-1913 setidaknya terdapat 549 industri pertambangan dan manufaktur

² Gerakan Memperkuat Diri merupakan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Qing pada tahun 1861-1895. Untuk memperkuat Cina, Cina harus mempelajari cara pembuatan kapal dan senjata, serta ilmu pengetahuan yang berada di balik teknologi militer tersebut. Hal ini bisa dicapai dengan membangun galangan kapal dan pabrik senjata serta mempekerjakan orang asing untuk melatih orang Cina membuat kapal dan senjata.

yang didirikan di Cina dan sebagian besar terpusat di Shanghai. Selama tahun 1914-1918, terdapat sekitar 539 industri nasional Cina. Di Shanghai sendiri, sekitar 83 industri Cina didirikan. Perkembangan industri nasional berkembang dengan sangat pesat pada periode 1914-1918 (Xu Xiaoqun, 2001: 27).

Gambar 2.1 Peta Persebaran Industri di Shanghai



Sumber: John E. Orchard "Shanghai." *Geographical Review* (1936). 21 April 2009 02:01
<http://www.jstor.org/stable/209460> hal. 28 (telah diolah kembali)

Baik perusahaan milik Cina maupun perusahaan milik asing sangat berperan penting dalam industrialisasi di Shanghai. Pada tahun 1933, hasil produksi manufaktur nasional Cina mencapai 2645.5 juta yuan. Dari jumlah tersebut, 727.7 juta yuan merupakan hasil produksi perusahaan Cina yang ada di Shanghai dan 323.3 juta yuan merupakan hasil produksi perusahaan asing di Shanghai. Dengan kata lain, total jumlah produksi perusahaan Cina dan perusahaan asing di Shanghai mencapai 39.7% dari keseluruhan total produksi nasional (Xu Xiaoqun, 2001: 28).

Dari segi bahan mentah, selain kapas lokal dan sutera, bahan mentah yang dibutuhkan untuk produksi industri di Shanghai sebagian diimpor dari luar negeri.

Ekspor utama Shanghai meliputi sutra, teh, minyak Tung³, telur, bulu babi, dan bijih tambang. Di sisi lain, impornya sebagian besar meliputi barang-barang seperti wool, minyak bumi, baja, dan zat-zat kimia. Perindustrian di Shanghai makin berkembang dan menguasai sepertiga dari keseluruhan industri, modal tetap industri, dan kekuatan buruh industri yang ada di Cina (Shabad, 1956: 125). Seiring berjalannya waktu, muncullah berbagai macam industri di Shanghai. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut yang memaparkan jenis-jenis industri yang ada di Shanghai hingga tahun 1931.

Tabel 2.1 Jenis Industri di Shanghai dan Aset yang Dimiliki

Jenis Industri	Jumlah	Aset yang dimiliki (\$)
Industri Kayu	15	104.833
Industri <i>Furniture</i>	17	835.500
Industri Logam	35	175.200
Industri Mesin	297	3.971.853
Industri Kapal dan Alat Transportasi Darat	20	459300
Industri Batu Bata, Tembikar, dan Kaca	45	3.405.855
Industri Bahan-bahan Konstruksi	5	69.555
Industri Gas, Listrik, dan Penyediaan Air	5	11.260.000
Industri Kimia	61	9.394.246
Industri Tekstil	537	53.346.285
Industri Pakaian dan Sepatu	171	4.855.387
Industri Kulit dan Karet	58	3.230.040
Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau	175	30.290.832
Industri Kertas dan Percetakan	155	16.891.611
Industri Ilmiah, Alat Musik, dan Jam	38	450.067
Industri Manufaktur lainnya	32	707.150
Total	1.666	139.447.714

Sumber: D. K. Lieu, *A Preliminary Report on Shanghai Industrialization*, (Shanghai, 1933), hal. 14-27 (telah diolah kembali)

³ Minyak Tung terbuat dari perasan biji buah dari pohon Tung. Kayu yang dilapisi oleh minyak ini akan bersifat tahan air dan warnanya tidak akan menjadi gelap seiring dengan berjalannya waktu. Minyak tung juga sering disebut sebagai 'minyak kayu Cina' karena telah ratusan hingga ribuan tahun digunakan di Cina untuk melapisi kayu pada kapal.

2.1.3 Sektor Perbankan

Sejak awal, perdagangan asing di Cina terhambat oleh kesulitan untuk mendapatkan kredit. Walaupun bank lokal Cina dan beberapa pedagang perantara memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan dengan menyediakan kredit bagi para pedagang Cina, mereka belum dapat memenuhi perkembangan kebutuhan keuangan para pengusaha asing. Untuk usaha grosir, pengangkutan, dan asuransi, sebagian besar firma komersial asing di Shanghai melakukan pertukaran dan fungsi kredit. Walaupun demikian, situasi semacam ini tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dagang asing untuk melakukan ekspansi perdagangan. Menanggapi kebutuhan tersebut, bank asing pertama, cabang dari Korporasi Perbankan Oriental, dibuka di Shanghai pada tahun 1848. Selanjutnya, bank asing lainnya mulai ikut dibuka, termasuk cabang dari Korporasi Perbankan Hongkong dan Shanghai yang dibuka pada tahun 1865. Antara tahun 1847 dan 1911 terdapat sekitar 27 bank asing yang didirikan di Shanghai (Xu Xiaoqun, 2001: 29).

Di sisi lain, antara tahun 1912 sampai 1927, jumlah bank lokal di Shanghai bertambah dari 18 menjadi 27. Peran penting yang dimiliki bank lokal dalam perdagangan ekspor-impor, fleksibel dalam transaksi, jam bisnis yang nyaman, bersedia bekerja sama dengan firma kecil, dan kredibilitas yang telah lama dibangun baik dengan pedagang asing maupun pedagang Cina membuat bank lokal dapat berjalan berdampingan dengan bank modern. Walaupun selama dekade Nanjing bank lokal mengalami banyak kesulitan karena beberapa faktor di luar kendali, mereka tetap bertahan sebagai 'pemain' dalam perekonomian Shanghai. Jumlah bank lokal dikurangi dari 85 menjadi 46 selama dekade tersebut, tetapi total modal bank tersebut tetap di atas 19 juta yuan (Xu Xiaoqun, 2001: 29).

Periode dari akhir dinasti Qing sampai tahun 1930an merupakan periode perkembangan sistem perbankan modern Cina. Bank Komersial Cina (Zhōngguó Tōngshāng Yínháng 中国通商银行) didirikan di Shanghai pada tahun 1897. Bank ini benar-benar mengikuti model Korporasi Perbankan Hongkong dan Shanghai (Xiānggǎng Shànghǎi Huìfēng Yínháng 香港上海汇丰银行) dalam hal pengelolaan dan operasinya. Selain itu, bank ini juga mempekerjakan orang asing

sebagai managernya di beberapa kota. Tiga belas tahun kemudian, enam belas bank Cina menjalankan usahanya, sepuluh di antaranya memiliki kantor pusat atau cabang di Shanghai. Di antara bank-bank tersebut terdapat *Bank of the Board of Revenue* (Hùbù Yínháng 户部银行) yang didirikan pada tahun 1905 dan Bank Komunikasi (Jiāotōng Yínháng 交通银行) yang didirikan pada tahun 1908. *Bank of the Board of Revenue* kemudian berubah menjadi Bank Cina (Zhōngguó Yínháng 中国银行) pada tahun 1912. Dari tahun 1912 sampai 1920 sembilan belas bank Cina lainnya dibuka di Shanghai. Pada tahun 1935 tujuh puluh tiga bank Cina, dua puluh empat bank asing, dua bank gabungan Cina-asing, dan lima puluh empat bank lokal beroperasi secara berdampingan di Shanghai (Xu Xiaoqun, 2001: 30). Selain itu terdapat pula institusi pelayanan kredit dan perbankan sebagai *trust companies* (Xintuō Gōngsī 信托公司), asosiasi penyimpanan (Chúxù Huì 储蓄会), perusahaan penukaran perak (Yín Gōngsī 银公司/yínhào 银号), kantor penilaian publik (Gōnggū Jú 公估局), dan perusahaan peleburan perak (Yínlú 银炉). Bank lokal dan bank modern bekerja sama dalam mendanai perusahaan Cina dan bankir untuk mengembangkan hubungan finansial di antara mereka.

2.2 Asosiasi-Asosiasi Pengusaha Shanghai

Walaupun perekonomian di Shanghai telah berkembang dengan sangat pesat sejak jaman dinasti Song, para pedagang tidak memiliki peran yang signifikan dalam bidang politik. Umumnya, pedagang tradisional Cina terikat dan dibatasi oleh pemerintah. Dalam tahap awal modernisasi ekonomi, pola dominasi pemerintah semacam ini terus berlangsung. Walaupun demikian, seiring dengan berkembangnya perekonomian modern pada awal abad ke-20, hubungan yang berbeda terjadi antara pengusaha dan pemerintah. Pemerintah tidak dapat lagi mempertahankan kendali dominannya terhadap pengusaha. Pada tahun 1912, misalnya, para pengusaha melalui asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Pendidikan Cina dan Federasi Majelis Propinsi bahkan dapat mengembangkan program nasional yang melampaui batasan propinsi (Fairbank and Goldman, 2006: 270).

Sebelum masa pemerintah Nanjing, pengusaha Shanghai menikmati kebebasan yang lebih besar dari kendali politik. Pada saat itu, mereka tidak hanya dapat melepaskan diri dari kendali pemerintah, tetapi juga dapat memberikan pengaruh politik yang cukup signifikan (Fox, 2000: 23). Keberadaan pemukiman internasional di Shanghai merupakan faktor penyebab utama kebebasan ini. Area tersebut selain tidak dapat dicapai secara langsung oleh kekuasaan pemerintah, perusahaan-perusahaan yang ada di sana juga bebas dari peraturan pemerintah (Hinder, 1942: 1-3). Kelemahan pemerintah Cina merupakan faktor kedua yang menimbulkan kebebasan bagi pengusaha Shanghai. Pemerintah kekurangan dana untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan baru dan kekuatan untuk mendominasi sektor swasta yang ada. Sebelum tahun 1927, ketika disintegrasi sistem politik mencapai puncaknya, kekuatan politik yang dimiliki pengusaha Shanghai berkembang dengan sangat pesat. Selain dapat mengembangkan organisasi independennya sendiri, mereka juga memiliki kontrol terhadap bank-bank dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan semi pemerintah, seperti Bank Cina dan Bank Komunikasi (Coble, 1980: 20). Oleh karena itu, pemerintah pusat yang lemah dan tidak stabil baik di tingkat nasional maupun propinsi selama tahun 1920-an membuat pengusaha Shanghai dapat memperluas kendali mereka terhadap perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau semi pemerintah.

Dalam bidang politik, pengusaha Shanghai membentuk berbagai macam asosiasi yang dirancang untuk mewakili kepentingan mereka, membuat peraturan sendiri di tengah absennya kontrol pemerintah, dan untuk memfasilitasi koneksi pribadi yang sangat penting dalam bisnis Cina. Asosiasi yang pertama kali muncul di Shanghai adalah *huiguǎn* (会馆), yang didominasi oleh pedagang kapal (*ship merchants*). Pada tahun 1775, pedagang kapal di Shanghai membentuk asosiasi perdagangan dari wilayah asal sama yang pertama di Shanghai, yaitu asosiasi kapal pedagang (Shāngchuán Huìguǎn 商船会馆). Pada dinasti Qing terdapat 124 asosiasi pedagang di Shanghai yang berorientasi pada perdagangan maupun asosiasi yang berlatar belakang dari wilayah yang sama. Bahkan, Linda C. Johnson dalam bukunya yang berjudul *Shanghai* menyebutkan bahwa asosiasi-asosiasi tersebut sebagai "asosiasi yang membentuk kota Shanghai" (Xu Xiaoqun,

2001: 83-84). Perkembangan dari asosiasi pedagang tersebut mencerminkan pentingnya sektor perdagangan dan dominannya posisi pedagang di Shanghai.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul asosiasi-asosiasi lain, seperti Asosiasi Bankir Shanghai (Shànghǎi Yínháng Tóngyè Gōnghuì 上海银行同业公会), yang dibentuk tahun 1915, dan Asosiasi Bankir Lokal Shanghai (Shànghǎi Qiányè Tóngyè Gōnghuì 上海钱业同业公会), yang dibentuk tahun 1917 dari gabungan antara beberapa qianzhuang lama. Di Shanghai, asosiasi bankir lokal ini menjadi penghubung antara bank asing dengan bank lokal, antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan perbankan, antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta antara bank lokal di wilayah pedalaman Shanghai dengan bankir dan pedagang asing (Jones, 1996: 366). Selain itu, Para pemilik pabrik kapas, para pemilik perusahaan perkapalan, para pedagang tenun kapas, dan pedagang kertas juga membentuk asosiasi semacam ini (Coble, 1980: 21). Melalui asosiasi-asosiasi tersebut, pengusaha Shanghai mempelajari pasar dunia dan mengubah cara tradisional mereka dalam memonopoli pasar (Fairbank; Goldman, 2006: 272).

Secara politik, asosiasi yang paling penting adalah asosiasi yang dapat menaungi pengusaha Shanghai dengan latar belakang profesi dan asosiasi yang berbeda-beda. Asosiasi-asosiasi semacam ini antara lain Kamar Dagang Shanghai (Shànghǎi Zǒngshānghuì 上海总商会), Asosiasi Pembayar Pajak Orang Cina di pemukiman internasional (Shànghǎi Gōnggòng Zūjiè nèi de Nàshuì Huárén 上海公共租界内的纳税华人), dan Federasi Perhimpunan Dunia Perdagangan Shanghai (Shànghǎi Gèlù Shāngjiè Liánhéhuì 上海各路商界联合会). Asosiasi-asosiasi tersebut menaungi para pedagang, industrialis, dan bankir Shanghai. Melalui asosiasi semacam inilah para pengusaha Shanghai memiliki peran politik pada periode akhir Qing dan awal periode Republik (Coble, 1980: 21).

Kamar Dagang Shanghai merupakan kamar dagang yang paling terkemuka dan paling berpengaruh dibandingkan dengan kamar dagang lainnya yang ada di Cina (Fairbank and Goldman, 2006: 271). Awalnya organisasi ini bernama Asosiasi Konsultasi Perdagangan Shanghai (Shànghǎi Shāngyè Huiyì Gōngsuǒ 上海商业会议公所). Berdiri pada tahun 1902, organisasi ini merupakan wadah

untuk mengumpulkan dan bertukar informasi mengenai masalah perdagangan. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan membantu menteri perdagangan dalam pekerjaannya. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Urusan Perdagangan Shanghai (Shànghǎi Shāngwù Zǒnghuì 上海商务总会) pada tahun 1904. Kemudian, baru pada tahun 1912 menjadi Kamar Dagang Shanghai (Fung S.S, *The China Weekly Review* 15 Desember 1928). Pada saat itu, Kamar Dagang Shanghai tidak hanya menjadi organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha Shanghai di sektor perdagangan saja tetapi juga perbankan dan perindustrian (Xu Xiaoqun, 2001: 84). Kehancuran dinasti Qing pada tahun 1911 dan kekacauan serta lemahnya pemerintahan Republik awal menyebabkan Kamar Dagang Shanghai memiliki peran politik yang lebih aktif dan independen. Oleh karena itu, Kamar Dagang Shanghai menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi politik para pengusaha Shanghai dan dengan cepat dapat memperoleh kekuatan politik (Fox, 2000: 23).

Pada tahun 1905, wilayah orang Cina di Shanghai mendirikan dewan kota terpilih. Hampir sebagian besar anggota dewan tersebut merupakan anggota dari Kamar Dagang Shanghai atau setidaknya terkait dalam sektor perdagangan. Program yang dijalankan oleh dewan tersebut adalah peningkatan dan modernisasi pelayanan kota, seperti menghancurkan tembok kota dan menggantinya dengan jalan dan *tramway*. Program semacam ini disokong oleh pengusaha Shanghai. Para pedagang juga tergabung dalam *China Merchant Drill Team* (Huáshāng Tīcāohuì 华商体操会), sebuah organisasi pelatihan militer lokal, yang dibentuk pada tahun 1905. Selama revolusi 1911, organisasi ini menjadi penyokong militer utama bagi kekuatan revolusioner di Shanghai. Selain itu, antara tahun 1912-1927 Kamar Dagang Shanghai sebagai penyuar aspirasi politik pengusaha Shanghai juga telah aktif dalam bernegosiasi dengan petinggi militer tingkat propinsi di lembah sungai Yangzi, kelompok buruh, serta dengan dewan kotapraja yang berada di Pemukiman Internasional (Fox, 2000: 23).

Para pengusaha Shanghai di pemukiman internasional juga membentuk Asosiasi Pembayar Pajak Orang Cina pada tahun 1921 untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi orang Cina dalam Dewan Kotapraja Shanghai. Walaupun populasi di pemukiman internasional sebagian besar adalah orang Cina,

anggota dewan tersebut sebagian besar dipilih oleh penduduk asing. Para pengusaha Shanghai membayar berbagai pajak kepada dewan tersebut, tetapi sebagian besar program yang dijalankan hanya berguna bagi penduduk asing. Seiring dengan semakin berkembangnya rasa nasionalis, para pengusaha Shanghai membenci situasi seperti ini. Pada akhirnya, para pengusaha Shanghai melalui asosiasi ini menyuarakan hak mereka dalam perwakilan di pemerintah.

Federasi Perhimpunan Dunia Perdagangan Shanghai di pemukiman internasional merupakan organisasi bisnis yang paling radikal secara politik. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1920 ini, terdiri dari pengusaha kecil yang menolak keanggotaan dalam Kamar Dagang Shanghai. Organisasi ini juga mendukung munculnya gerakan nasionalis pada tahun 1920an dan mengutuk para pemimpin Kamar Dagang Shanghai yang bekerja terlalu dekat dengan pihak asing di Shanghai.

Di Shanghai terdapat pula kelompok yang terdiri dari pemimpin bisnis yang didasari oleh ikatan satu propinsi yang dikenal dengan nama Grup Zhejiang (Zhèjiāng Xì 浙江系) atau Pengusaha Zhejiang-Jiangsu (Jiāngzhè Cáifā 江浙财阀). Kelompok ini berasal dari asosiasi Ningbo (Níngbō Bāng 宁波帮), sebuah asosiasi pedagang dan bankir Shanghai yang berasal dari tujuh kabupaten (xiàn 县) yang mengelilingi kota Ningbo (宁波) di Zhejiang (浙江). Pada sebagian besar transaksi, pengusaha Cina secara tradisional membutuhkan ikatan atau kenalan yang saling menguntungkan melalui sebuah kelompok dengan ikatan yang erat. Kelompok dengan ikatan erat semacam ini di antaranya adalah serikat Ningbo yang memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis di Shanghai (Jones, 1996: 363).

Kekuatan dari serikat Ningbo terpusat pada perbankan lokal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar qianzhuang di Shanghai didirikan oleh bankir yang berada di Ningbo. Setelah tahun 1875, anggota dari serikat ini juga meliputi kegiatan pedagang perantara, perindustrian, dan perbankan modern. Pada tahun 1895, ketika pembukaan Shanghai terhadap perkembangan perindustrian asing membawa pada sebuah revolusi ekonomi, serikat Ningbo menjadi kekuatan utama orang Cina di Shanghai.

Pada tahun 1895 hingga 1920, perekonomian dan populasi Shanghai berkembang dengan sangat pesat. Para pengusaha Cina memasuki sektor perbankan modern dan manufaktur yang baru. Hal ini menyebabkan munculnya pengusaha baru yang berasal dari berbagai wilayah di Cina. Kebutuhan akan hubungan pribadi dan kelompok dengan ikatan yang erat begitu kuat. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi Grup Ningbo begitu hebat sehingga banyak pengusaha baru dari daerah lain ingin membangun hubungan dengan grup tersebut. Anggota dari serikat Ningbo secara bertahap mulai menerima pengusaha non-lokal ke dalam jaringan hubungan pribadi mereka hingga mereka membentuk Klik Zhejiang yang lebih besar. Grup yang diperluas ini, dengan serikat Ningbo sebagai intinya, dapat mendominasi komunitas bisnis di Shanghai. Klik Zhejiang mengendalikan sebagian besar bank lokal Shanghai, sebagian besar pabrik tenun kapas Shanghai, sebagian besar pedagang perantara bea cukai, perusahaan perkapalan, dan firma pertambangan batu bara yang berada di Shanghai. Grup ini juga memimpin sebagian besar organisasi para pengusaha yang telah disebutkan sebelumnya, seperti Kamar Dagang Shanghai, Asosiasi Bankir Shanghai, dan Asosiasi Bankir Lokal. Pada tahun 1923 misalnya, 86% anggota Kamar Dagang Shanghai berasal dari Zhejiang (Coble, 1980: 24).

Seiring dengan bertambah pesatnya kekuatan grup Zhejiang, klik dari wilayah lain menjadi semakin dekat dengan grup ini. Oleh karena itu, sebutan "grup Zhejiang", atau "pengusaha Zhejiang-Jiangsu" tidak lagi mengandung makna pengusaha dari wilayah yang sama. Hal ini dapat terlihat dalam bank modern yang dikontrol oleh Klik Zhejiang, Jiangsu, Anhui, dan Sichuan, semuanya termasuk dalam "grup Zhejiang" karena para bankir yang berasal dari Zhejiang merupakan pemimpin utama. Grup Zhejiang memimpin empat belas dari dua puluh dua bank dalam Asosiasi Bankir Shanghai. Karena grup Zhejiang begitu mendominasi bisnis dan perbankan di Shanghai, sebutan untuk mereka dapat dipertukarkan dengan sebutan "para pengusaha Shanghai" atau "pengusaha Zhejiang-Jiangsu" (Coble, 1980: 25).

Pada tahun 1919, penolakan Konferensi Damai Versailles terhadap kekuasaan Cina atas propinsi Shandong telah menimbulkan Gerakan Empat Mei dengan demonstrasi dan boikot anti imperialis dalam jumlah yang besar. Kegiatan

semacam ini mencapai puncaknya pada insiden 30 Mei 1925 ketika polisi asing di pemukiman internasional membunuh beberapa pelajar Cina. Pengusaha Cina, setidaknya pada awalnya, merupakan penyokong gerakan nasionalis semacam ini. Pada Gerakan Empat Mei misalnya, para pedagang dengan cepat bergabung dalam demonstrasi yang dibentuk oleh kelompok pelajar. Simpati para pedagang terhadap gerakan nasionalis disebabkan karena kehadiran pihak asing di Cina menjadi penghalang utama bagi para pengusaha pada tahun 1920an.

Selama tidak adanya kompetisi dengan pihak asing yang disebabkan oleh perang dunia pertama, pengusaha Shanghai telah berkembang sampai ke area manufaktur dan perbankan modern. Area ini sebelumnya didominasi oleh pihak asing. Tahun 1924, jaman keemasan bagi pengusaha Shanghai ini berakhir dengan kembalinya kompetisi asing. Krisis ekonomi menyebabkan para industrialis Cina begitu membenci pihak asing. Hal ini disebabkan karena pengusaha Cina menghadapi kompetisi tidak hanya dari segi impor barang asing, tetapi juga industri milik asing di Cina yang modal dan teknologinya jauh lebih baik dari Cina. Pada tahun 1930, misalnya, terdapat 43 pabrik kapas milik Jepang di Cina yang jumlahnya lebih sedikit daripada pabrik kapas milik Cina. Walaupun demikian, total jumlah modal yang dimiliki oleh pabrik kapas Jepang mencapai 149 juta yuan, lebih besar dibandingkan total jumlah modal yang dimiliki pabrik kapas Cina yang berjumlah 130 juta yuan (Coble, 1980: 26). Menghadapi kenyataan semacam ini, pengusaha Shanghai mendukung gerakan anti imperialis dengan harapan bahwa pemerintah Cina yang kuat dapat mengurangi pengaruh ekonomi asing di Cina yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi industrialis, bankir, dan pengusaha Cina.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum masa pemerintah Nanjing, pengusaha Shanghai yang terdiri dari pedagang, industrialis, dan bankir merupakan kelompok ekonomi terkuat di Cina. Hal ini disebabkan karena pengusaha Shanghai memiliki sebagian besar dari sumber daya di sektor perdagangan, perindustrian, dan perdagangan Cina. Sifat independen yang tercermin melalui organisasi mereka inilah yang membuat pengusaha Shanghai sebelum masa pemerintah Nanjing telah memiliki peran yang aktif, baik di bidang ekonomi dan politik.

BAB III

PENGUSAHA SHANGHAI DAN PEMERINTAH NANJING (1927-1933)

3.1 Kebijakan Pemerintah Nanjing terhadap Pengusaha Shanghai

3.1.1 Peraturan Kuomintang terhadap Asosiasi Pengusaha Shanghai

Pada awal tahun 1927, seiring dengan kemenangan Kuomintang dalam Ekspedisi ke Utara melawan *warlord*, pengusaha Shanghai menyambut perubahan politik ini dengan membentuk asosiasi-asosiasi. Salah satu asosiasi-asosiasi tersebut adalah asosiasi pedagang yang jumlahnya sangat banyak. Pengusaha Shanghai mengira mereka telah memasuki sebuah era baru yang mengizinkan keikutsertaan mereka dalam proses politik. Sebelum akhirnya mereka disadari oleh adanya pemerintahan partai (*dǎngzhì* 党治) di bawah Kuomintang.

Kuomintang memiliki ideologi partai (*dǎngyì* 党义) untuk mengatur negara. Ideologi ini mencakup Tiga Prinsip Rakyat (*Sānmín Zhǔyì* 三民主义) dan konsep Sun Yat-sen mengenai Garis besar Pembangunan Negara (*Jiànguó Dàgāng* 建国大纲). Menurut Sun, rakyat Cina masih belum bisa memikul tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sendiri (*zìzhì* 自治). Jadi, ia merumuskan revolusi nasionalis (*guómín gémìng* 国民革命) terbagi ke dalam tiga tahap. Revolusi nasionalis harus bergerak dari pemerintah militer (*jūnzhèng* 军政) melalui pemerintah *tutelage* (*xùnzhèng* 训政) untuk mencapai pemerintah konstitusional (*xiànzhèng* 宪政). Pada masa pemerintah militer, Kuomintang menggunakan kekuatan militer untuk memperkuat kekuasaan politik (*zhèngquán* 政权). Selain itu, "kekuatan militer juga digunakan untuk memberantas segala rintangan, dan kemudian meletakkan dasar bagi pemerintah rakyat" (*Bái gāng* 白钢, 2000: 917).

Pada bulan Juni 1928, setelah berhasil menguasai Beijing, pemerintah Nanjing mengumumkan bahwa tahap pertama revolusi telah selesai. Pada saat itulah dimulainya tahap yang kedua, yaitu masa pemerintah *tutelage*. Hal ini ditegaskan dalam rapat Komite Harian Ke-172 Pusat Kuomintang (*Guómíndǎng Zhōngyāng Dì 172 Cì Chángwěiyuánhùi* 国民党中央第172次常务委员会) yang diadakan pada bulan Oktober 1928. Komite ini mengumumkan peralihan masa

dari “pemerintah militer” menjadi ”pemerintah *tutelage*”. Komite ini juga mengumumkan Program Pemerintah Pengawasan Kuomintang Cina (Zhōngguó Guómíndǎng Xùnzhèng Gānglǐng 中国国民党训政纲领). Pada Pemerintah *tutelage*, kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan rakyat (zhèngquán 政权) dan kekuasaan pemerintah (zhìquán 治权). Kekuasaan rakyat dijalankan oleh Kongres Nasional Partai Kuomintang (Guómíndǎng Quánguó Dàibiǎo Dà huì 国民党全国代表大会) yang memandu rakyat. Sedangkan kekuasaan pemerintah dijalankan oleh pemerintah nasional (Bái gāng 白钢, 2000: 917). Dalam hal ini, Kuomintang merupakan pengawas pemerintah tertinggi (zuìgāo xùnzhèngzhě 最高训政者). Pada tahap ini pula, Kuomintang akan menggunakan kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dan memerintah negara melalui partai (yǐ dǎng zhì guó 以党治国) (Lǐ Lǐ 李理 & Xiàcháo 夏潮, 2004: 237).

Pada tahap ini, Kuomintang mewakili rakyat untuk menjalankan kedaulatan negara. Di saat yang bersamaan di berbagai wilayah melatih rakyat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Melalui pemilihan kepala tingkat kabupaten, menyelenggarakan kongres tingkat kabupaten, dan menetapkan undang-undang, maka tingkat kabupaten bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, rakyat baru bisa mendapatkan pendidikan untuk mempersiapkan diri masuk ke tahap yang ketiga, yaitu masa pemerintahan konstitusional. Pada masa pemerintah konstitusional ini, ”setelah menunggu otonomi daerah sempurna, lalu memilih perwakilan nasional, membentuk komite konstitusi, serta membangun konstitusi. Hari ketika dikeluarkannya konstitusi merupakan ”masa keberhasilan revolusi” (“Nánjīng Zhèngquán de Yìshí Xíngtài...”, 2009:1).

Dengan prinsip dominasi partai yang demikian tegas, Kuomintang secara bertahap mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur asosiasi-asosiasi di Shanghai, termasuk di dalamnya asosiasi-asosiasi pengusaha Shanghai. Peraturan pertama disusun oleh Departemen Pusat Organisasi Kuomintang dan dikeluarkan pada bulan Juni 1927 dalam Rapat Rutin Kuomintang ke-2 (èr jiè zhōngcháng huì 二届中常会). Rapat tersebut menetapkan peraturan mengenai hubungan asosiasi massa dan partai di tiap tingkatan (Gè jí Dǎngbù yǔ Gè jí Míngzhòng Tuántǐ zhī

Guānxì Tiáoli 各级党部与各级民众团体之关系条例). Menurut peraturan tersebut, definisi hubungan antara Kuomintang dan asosiasi massa (Mínzhòng Tuántǐ 民众团体 / Rénmín Tuántǐ 人民团体) adalah sebagai berikut:

“凡民众团体之组织与活动应按其性质与范围受各级党部之监督与指导...各级党部对民众团体不服从警告或纠正时，得呈请上级党部核办...各民众团体如发生重大事故，当地党部认为应紧急处置时，得由党部知会当地军警制止，同时呈所上级党部核办。”

“Setiap kegiatan dan organisasi dari asosiasi massa, berdasarkan sifat dan ruang lingkupnya, mendapatkan pengawasan dan panduan dari partai di tiap tingkatan ... Ketika asosiasi massa tidak mematuhi peringatan dan perbaikan [tersebut], partai di tiap tingkatan harus menyerahkannya kepada partai di tingkatan lebih tinggi ... Jika asosiasi massa menimbulkan kecelakaan besar, ketika partai setempat menganggapnya mendesak untuk ditangani, polisi dan tentara setempat melalui pemberitahuan partai menghentikannya, di saat bersamaan menyerahkan [masalah ini] kepada partai di tingkatan lebih tinggi.” (Zhào Lìdòng 赵利栋, 2002: 1)

Dari ketetapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kuomintang memiliki kekuasaan untuk memandu (lǐngdǎoquán 领导权) asosiasi massa. Jadi, apabila Kuomintang menganggap kegiatan yang dijalankan oleh sebuah asosiasi massa tidak sesuai, Kuomintang melalui keputusan rapat komite (wěiyuánhùi yìjué 委员会议决) dapat memberikan peringatan maupun perbaikan kepada asosiasi massa tersebut.

Pada bulan Juni 1928, Komite Urusan Partai dan Pelatihan Massa (Dǎngwù yǔ Mínhòng Xùnliàn Wěiyuánhùi 党务与民众训练委员会) dari Markas Besar Partai Kotapraja Kuomintang mengeluarkan peraturan mengenai pendaftaran asosiasi massa (Mínhòng Tuántǐ Dēngjì Tiáoli 民众团体登记条例).

Peraturan tersebut menyatakan beberapa persyaratan bagi berbagai asosiasi yang akan mendaftar kepada komite. Persyaratan tersebut yaitu mendukung Kuomintang dan Tiga Prinsip Rakyat. Sedangkan materi-materi yang harus dilengkapi adalah anggaran dasar asosiasi, daftar para pemimpinnya, dan daftar anggota serta data pribadinya. Setelah pendaftaran, asosiasi tersebut harus memberikan laporan bulanan mengenai kepemimpinan, keanggotaan, status keuangan, masalah internal, dan situasi yang tidak biasa yang berhubungan dengan asosiasi-asosiasi tersebut. Lebih lanjut, pada musim semi tahun 1928, Biro Kotapraja Shanghai untuk Masalah-masalah Sosial mengeluarkan peraturan bagi pendaftaran organisasi-organisasi perdagangan dan perindustrian (Gōngshāng Tuántǐ 工商团体) (Xu Xiaoqun, 2001: 102-103).

Selanjutnya untuk memperkuat peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya, pada bulan Juni 1929, Rapat Keseluruhan Pertama Komite Pusat Ke-3 (Sān Jiè Zhōngzhíwěi Dì Yī Cì Quántǐ Huìyì 三届中执委第一次全体会议) menetapkan Rancangan Pengorganisasian Asosiasi Massa (人民团体组织方案). Dalam rancangan tersebut, ditetapkan pembagian tugas terhadap hubungan antara Kuomintang dan Pemerintah Nasional terhadap asosiasi massa. Pembagian tugas tersebut antara lain sebagai berikut:

”本党对于依法组织之人民团体，应尽力扶植，加以指导；对于违反三民主义之行为，应加以严厉之纠正...对于非法之团体，本党应尽力检举，由政府制裁之...应在党部指导政府监督下组织之，并得依法呈请政府核准立案”

”partai harus sekuat tenaga menopang dan memandu asosiasi massa yang menaati hukum; [sebaliknya] harus dengan tegas memperbaiki sikap [asosiasi] yang melanggar Tiga Teori Rakyat ... partai sekuat tenaga melaporkan asosiasi yang melanggar hukum, pemerintah memberikan sanksi kepadanya [asosiasi tersebut] ... melalui panduan partai dan pengawasan pemerintah mengorganisasinya [asosiasi tersebut], dan berdasarkan hukum

meminta instruksi pemerintah memeriksa kasus tersebut.”
(Zhōngyāng Dǎngwù Yuèkān 中央党务月刊, 17 Juni 1929)

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kuomintang tersebut semakin menegaskan adanya kendali yang kuat oleh Kuomintang terhadap kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi massa, termasuk organisasi pengusaha Shanghai.

Pada bulan yang sama, Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral ke-3 Kuomintang mengeluarkan resolusi mengenai Prosedur Pembentukan Asosiasi Masyarakat (Rénmín Tuántǐ Shèlì Chéngxù àn 人民团体设立程序案). Resolusi tersebut mengelompokkan asosiasi massa ke dalam dua kategori, asosiasi berdasarkan pekerjaan (Zhíyè Tuántǐ 职业团体) dan asosiasi sosial (Shèhuì Tuántǐ 社会团体). Kamar Dagang Shanghai dan asosiasi-asosiasi yang dimiliki oleh pengusaha Shanghai termasuk ke dalam asosiasi jenis pertama. Resolusi ini mencerminkan usaha Kuomintang untuk mengendalikan asosiasi pengusaha Shanghai.

Dari tahun 1929-1931 usaha Kuomintang untuk mengatur pengusaha Shanghai secara bertahap semakin terstruktur. Kuomintang menetapkan peraturan-peraturan untuk mengawasi dan mengendalikan asosiasi pengusaha Shanghai. Pada bulan Juli 1930 misalnya, Revisi Rancangan Pengorganisasian Asosiasi Massa (Xiūzhèng Rénmín Tuántǐ Zūzhī Fāng'àn 修正人民团体组织方案) dikeluarkan oleh Komite Eksekutif Pusat Kuomintang. Melalui revisi rancangan ini, syarat pembentukan asosiasi menjadi lebih ketat. Untuk asosiasi berdasarkan pekerjaan misalnya, harus beranggotakan minimal lima puluh anggota. Seluruh asosiasi harus mendapatkan izin dari markas besar partai Kuomintang dan mendapat pengawasan dari pimpinan Kuomintang. Selain itu, asosiasi harus mengikuti aturan Tiga Prinsip Rakyat, mematuhi arahan dari Kuomintang, menaati hukum dan perintah dari pemerintah. Asosiasi berdasarkan pekerjaan misalnya, hanya boleh menerima orang-orang yang memiliki pekerjaan legal, tidak pernah terlibat tindakan reaksioner dan tidak pernah dikeluarkan dari partai. Pertemuan-pertemuan asosiasi juga harus mendapat persetujuan dari markas besar partai (Xu Xiaoqun, 2001: 98-99).

Akhirnya, demi menyempurnakan kendali pemerintah atas asosiasi massa, Kuomintang mengeluarkan Hukum Darurat bagi Tindak Kejahatan terhadap Negara (Wéihài Mínguó Jǐnjí Zhìzuìfǎ 危害民国紧急治罪法) yang bertujuan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang berusaha menentang pemerintah, termasuk penggunaan asosiasi-asosiasi untuk merugikan pemerintah (Xu Xiaoqun, 2001: 102). Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Kuomintang menunjukkan adanya kontrol pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai asosiasi massa, termasuk asosiasi pengusaha Shanghai. Selain itu, berbagai bentuk peraturan yang membatasi ruang gerak pengusaha Shanghai, menunjukkan adanya pengawasan ketat pemerintah Nanjing terhadap kegiatan yang dijalankan oleh massa. Peraturan-peraturan yang telah dipaparkan di atas juga dibentuk untuk menempatkan seluruh asosiasi pengusaha Shanghai di bawah pengawasan Kuomintang.

Selain peraturan-peraturan yang dikeluarkan Kuomintang, faktor lain yang mempengaruhi hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing (1927-1933) adalah kebijakan yang dijalankan oleh Chiang Kai-shek sebagai presiden dan T.V Soong sebagai menteri keuangan saat itu. Latar belakang dan karakter kedua tokoh ini sangat mempengaruhi hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing.

3.1.2 Kebijakan Chiang Kai Shek terhadap Pengusaha Shanghai

Chiang Kai Shek (Jiǎng Jièshí 蒋介石) lahir di Xikou, sebuah kota di sebelah barat daya Ningbo, kabupaten Fenghua, *prefecture* Ningbo, propinsi Zhejiang. Ayahnya, Chiang Zhaocong (蒋肇聪), dan ibunya, Wang Caiyu (王采玉) berasal dari keluarga pedagang garam kelas menengah atas. Chiang tumbuh dalam masa ketika banyak terjadi perang sipil di antara *warlord*. Ia memutuskan untuk berkarir dalam bidang militer untuk menyelamatkan Cina. Ia memulai pendidikan militernya di Akademi Militer Baoding pada tahun 1906. Selanjutnya, ia meneruskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Militer di Tokyo, Jepang dari tahun 1907 dan kembali ke Cina pada tahun 1911. Pada tahun 1910, Chiang menjadi pengikut Sun Yat-sen (Sūn Zhōngshān 孙中山) dan berpartisipasi dalam kegiatan militer pada tahun 1911 dan 1913. Selama masa Perang Dunia

pertama, Chiang menjadi makelar kecil di Shanghai dan kemudian kembali aktif dalam bidang militer. Pada saat inilah Chiang membangun hubungan yang dekat dengan grup Zhejiang yang merupakan salah satu kelompok pengusaha di Shanghai. Bahkan, grup ini telah memberikan bantuan keuangan kepada Chiang ketika ia menjadi makelar selama di Shanghai. Karir Chiang dalam bidang militer benar-benar dimulai ketika Sun mengirimnya ke Moscow pada tahun 1923 (Fairbank, 1968: 178).

Pada masa pemerintah Nanjing, Chiang Kai-shek memiliki berbagai macam kedudukan politik di partai, pemerintahan, dan militer. Ia menjalankan kekuasaan tertinggi pada keseluruhan sistem pemerintahan. Hé Liáncéng (何廉曾) yang menjabat sebagai penasihat Chiang Kai-shek, berkata demikian mengenai kekuasaan yang dimiliki Chiang Kai-shek:

“ 委员长走到哪里，政府的真正权力就行使到哪里。就职权而言，他领导一切 ”

”Ketua komite berjalan ke mana, kekuasaan sesungguhnya pemerintah juga akan dijalankan kemana. Itulah wewenangnya, ia memimpin semuanya.“

Sedangkan, seorang menteri luar negeri Amerika yang meninjau Cina pada tahun 1934, berkata demikian mengenai Chiang Kai-shek:

“ 蒋介石的影子遍布各个角落。〔如果没有来过南京〕我将不愿相信他控制政府达到如此明显的程度。他的利益触及哪里，哪里就有政府的活动。 ”

“Bayang-bayang Chiang Kai-shek tersebar di masing-masing sudut. (Jika tidak pernah datang ke Nanjing) saya tidak akan percaya ia mengendalikan pemerintah sampai tahap yang demikian nyata. Kepentingannya menyentuh hingga kemana-mana, (yaitu) di mana ada aktifitas pemerintah.” (“Nánjīng Zhèngquán de Yìshí Xíngtài...”, 2009: 1)

Kepemimpinan Chiang didasari dengan kemampuannya dalam mengadakan perjanjian rahasia serta membentuk dan menghancurkan koalisi (Lary, 2007: 104-105). Hal ini terlihat ketika Chiang mengadakan pertemuan rahasia dengan para pengusaha Shanghai dan pemimpin organisasi rahasia, Gang Hijau untuk membahas bagaimana menghancurkan komunis. Chiang juga merupakan pemimpin yang tidak bisa mentolerir pihak-pihak yang tidak sepaham dengannya. Ketika pengusaha Shanghai mulai menolak tuntutan dana Chiang yang mereka anggap sudah melampaui kemampuan mereka. Chiang tidak dapat menerima hal ini dan mulai menerapkan kebijakan kekerasan. Selain itu, Chiang juga membubarkan Kamar Dagang Shanghai, sebuah organisasi milik para pengusaha Shanghai. Hal ini dilakukan Chiang untuk menghentikan para pengusaha Shanghai yang dianggap dapat menentang supremasi politik partai.

Pada bulan Juli 1926 diadakan Ekspedisi ke Utara yang bertujuan untuk mempersatukan Cina dengan menumpas *warlord* di utara. Dalam ekspedisi ini, Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek berkerja sama dengan partai Komunis membentuk sebuah gerakan massa. Sebelum Ekspedisi ke Utara ini dimulai, sudah terlihat pengaruh Komunis dalam Kuomintang yang semakin besar. Pada kongres Kuomintang yang kedua bulan Januari 1926 misalnya, dari 278 delegasi yang hadir, 168 di antaranya berasal dari golongan kiri (komunis), hanya 65 delegasi yang bersikap netral, dan 45 delegasi berasal dari golongan kanan. Selain itu, dalam rencana Ekspedisi ke Utara, tentara Kuomintang dan Komunis akan menggunakan tenaga petani lokal dan buruh kota untuk mengacaukan kekuatan musuh di sepanjang jalur perjalanan Kuomintang. Partai Kuomintang dan Komunis juga berencana menggunakan buruh yang berasal dari Guangdong dan para petani yang berada di sepanjang jalur perjalanan Ekspedisi ke Utara untuk mengangkut perbekalan militer. Para buruh kereta api juga diorganisir untuk merusak jalur kereta api yang dikuasai musuh (Spence, 1990: 343-345).

Pengaruh Komunis yang semakin besar dalam partai Kuomintang serta jumlah buruh dan petani yang sangat banyak tidak disukai oleh para tuan tanah dan industrialis Cina. Hal ini disebabkan karena para petani selalu menuntut sewa

tanah yang rendah dan para buruh juga sering melakukan pemogokan untuk menuntut upah yang lebih tinggi (Spence, 1990: 342). Di Shanghai sendiri, buruh pabriknya mencapai seratus lima puluh ribu orang (Coble, 1980: 28). Gerakan buruh di bawah pimpinan Komunis ini membuat pengusaha Shanghai menjadi takut. Para pengusaha Shanghai sangat diuntungkan dengan ekspansi besar yang terjadi di Shanghai sebagai pusat industri dan pelabuhan internasional. Jika gerakan buruh ini semakin besar dan melakukan pemogokan maka mereka akan mengalami kerugian besar. Pemogokan yang diorganisir oleh para pemimpin buruh Shanghai dengan bantuan *General Labour Union* menyebabkan perekonomian Shanghai terhenti selama dua hari. Pabrik kapas, sutra, dan pusat komersial lainnya ditutup akibat pemogokan ini (Spence, 1990: 350). Oleh karena itu, mereka berusaha membentuk aliansi dengan kaum moderat dari Kuomintang. Di saat yang bersamaan, Chiang Kai-shek sedang berada dalam tahap perpecahan dengan sayap kiri Kuomintang yang berada di Wuhan (武汉). Oleh karena itu, para pengusaha Shanghai segera menawari Chiang Kai-shek 'bantuan dana' asalkan ia mau memutuskan hubungan dengan Komunis.

Hubungan Chiang Kai-shek dengan pengusaha Shanghai sebenarnya telah terbentuk sejak awal sebelum retaknya hubungan Chiang Kai-shek dengan pemerintahan di Wuhan. Tempat kelahiran Chiang berada di kabupaten Fenghua, prefecture Ningbo, propinsi Zhejiang. Ia telah memiliki hubungan yang dekat dengan grup Zhejiang yang merupakan salah satu kelompok pengusaha di Shanghai. Bahkan, grup ini telah memberikan bantuan keuangan kepada Chiang ketika ia menjadi makelar selama di Shanghai. Oleh karena itu, Chiang telah memiliki hubungan dengan pemimpin utama dari komunitas pebisnis di Shanghai (Jones, 1996: 378).

Aliansi Chiang Kai-shek dengan pengusaha Shanghai pertama kali diawali dengan pertemuan pada akhir tahun 1926. Pada pertemuan yang bertempat di markas Chiang di Nanchang tersebut, Kamar Dagang Shanghai menawarkan bantuan keuangan untuk Chiang. Hasil pertemuan tersebut menyetujui membantu Chiang asalkan ia memutuskan hubungan dengan Komunis. Chiang yang menyetujui tawaran ini segera mendapatkan bantuan awal yang berjumlah tiga juta yuan sebagai pinjaman jangka pendek (Coble, 1980: 30). Pada pertemuan

rahasia lainnya, perantara Chiang berhasil bernegosiasi dengan Bank Cina di kota tersebut. Pembicaraan juga dilakukan dengan pemimpin Gang Hijau, sebuah organisasi rahasia di Shanghai, mengenai penindasan terhadap gerakan buruh di kemudian hari (Spence, 1990: 351). Kemudian pada akhir bulan Maret 1927, Chiang mengadakan pertemuan dengan para industrialis Shanghai dan pemimpin Gang Hijau. Pada kesempatan yang sama, Chiang kembali mendapat pinjaman dari para bankir Shanghai dan mengirim unit tentara yang 'bersimpati' dengan para buruh keluar dari Shanghai (Spence, 1990: 353).

Walaupun demikian, "hubungan baik" di antara Chiang dan pengusaha Shanghai berakhir dengan cepat. Hal ini disebabkan karena dana yang dibutuhkan untuk membiayai Ekspedisi ke Utara semakin lama semakin besar sehingga tuntutan dana yang diajukan oleh Chiang kepada pengusaha Shanghai juga makin lama makin besar dan tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha Shanghai. Akibatnya, pengusaha Shanghai mulai menolak tuntutan dana Chiang yang mereka anggap sudah melampaui kemampuan mereka. Chiang Kai-shek yang menyadari bahwa kebijakan persuasif tidak dapat lagi digunakan untuk menggali dana dari pengusaha Shanghai, mulai menerapkan kebijakan kekerasan (Coble, 1980: 32).

Beberapa bulan setelah penyerangan Chiang terhadap persatuan buruh yang didominasi Komunis di Shanghai pada bulan April 1927, Chiang melakukan teror terhadap para pengusaha Shanghai. Hal ini dianggap Chiang sebagai satu-satunya cara untuk mengumpulkan jutaan *dollar* yang dibutuhkan untuk membiayai tentaranya setiap bulan dan mempertahankan momentum dari Ekspedisi ke Utara. Chiang memaksa pemimpin Kamar Dagang Shanghai untuk menyediakan pinjaman sebesar sepuluh juta *dollar*. Bagi pengusaha Shanghai yang menolak tuntutan Chiang ini maka harta miliknya akan disita dan pengusaha tersebut akan diasingkan. Selain itu, kebijakan menggunakan kekerasan ini juga memaksa pengusaha Shanghai untuk membeli surat berharga jangka pendek senilai 30 juta yuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika ada pengusaha Shanghai yang menolaknya maka Chiang Kai-shek tidak segan-segan untuk melakukan teror agar mereka mau mengeluarkan dana.

Salah satu bentuk teror yang dilakukan oleh Chiang tuduhan sebagai 'kontrarevolusioner' atau 'komunis' kepada beberapa pengusaha yang menolak

untuk memberikan pinjaman dana. Selain itu, Chiang juga bekerja sama dengan Gang Hijau untuk menculik anak-anak dari para pengusaha di Shanghai. Anak-anak ini baru akan dilepaskan apabila orang tua mereka memberikan sejumlah uang tebusan kepada Chiang. Uang tebusan tersebut antara lain berjumlah 670.000 yuan bagi pemilik pabrik pemintalan kapas dan 200.000 yuan bagi pedagang (Spence, 1990: 361). Aliansi Chiang dengan Gang Hijau membuat Chiang memiliki kendali sepenuhnya atas Shanghai. Pemukiman Internasional, tempat sebagian besar pengusaha Shanghai bermukim, memang tidak bisa dimasuki seenaknya oleh agen Kuomintang karena ada batasan hukumnya. Namun, bagi Gang Hijau sebagai organisasi rahasia hal ini tidak menjadi halangan.

Teror terhadap para pengusaha di Shanghai juga dilakukan ketika terjadi boikot anti Jepang pada bulan Juni 1927. Chiang membentuk Liga Pemutusan Hubungan Ekonomi dengan Jepang dan mulai menangkap para pedagang dan mendenda mereka karena dianggap merusak boikot anti Jepang. Denda sebesar 150.000 yuan dibebankan kepada masing-masing penyalur barang dan pedagang gula. Anggota Gang Hijau bertanggung jawab memasuki wilayah orang Cina dan daerah konsesi asing untuk melakukan penangkapan ini. Mereka yang tidak mau membayar denda akan dituduh sebagai antek-antek Jepang (Spence, 1990: 362).

3.1.3 Kebijakan T.V Soong terhadap Pengusaha Shanghai

T. V Soong (Sòng Ziwen 宋子文) lahir di Shanghai pada tanggal 4 Desember 1894. Setelah memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Harvard dan menyelesaikan beberapa kursus di Universitas Columbia, Soong kembali ke Cina. Di Cina, ia bekerja di perusahaan Hanzhiping (Hànzhīpíng Gōngsī 汉治萍公司), yaitu sebuah perusahaan besi dan batu bara. Selain itu, Soong juga aktif dalam perdagangan dan perbankan di Shanghai.

Pada tahun 1923, Sun Yat-sen, yang menikah dengan kakak perempuan Soong yang bernama Song Qingling (宋庆龄), merekrut Soong sebagai manager administrasi garam di Guangdong dan Guangxi. Pada saat itu, Guangdong dan Guangxi merupakan sumber pemasukan bagi pemerintahan Sun. Soong juga ditugaskan untuk menyelidiki dan memperbaiki kekacauan keuangan yang terjadi

di Guangdong. Hasil dari penyelidikan ini adalah pendirian Bank Sentral di Guangdong pada bulan Agustus 1924. Di bawah pengelolaan Soong, bank tersebut berhasil membuat perbaikan terhadap kekacauan keuangan yang sebelumnya terjadi di Guangdong. Bahkan, pada tahun 1926 bank tersebut juga ikut serta dalam mendanai Ekspedisi ke Utara.

T. V Soong menjabat sebagai menteri keuangan pada masa pemerintah Guangdong yang berdiri pada bulan September 1925. Pada bulan Januari 1926, dalam Kongres Nasional Ke-2 Kuomintang, Soong terpilih menjadi salah satu anggota Komite Eksekutif Pusat dan menjabat sebagai menteri perdagangan. Tak lama kemudian, Soong juga terpilih menjadi anggota Dewan Pemerintah Nasional. Pada tahun 1926, Soong juga aktif dalam menangani masalah diplomasi internasional. Ia dikirim ke Hongkong untuk bernegosiasi dengan pemerintah Inggris mengenai gerakan anti Inggris saat itu (Boorman, 149).

Pada tanggal 21 Februari 1927, Sidang Pleno ke-3 Komite Eksekutif Pusat ke-2 Kuomintang memutuskan pemindahan pemerintah Nasional ke Wuhan. Pemerintah Wuhan, yang didominasi oleh sayap kiri Kuomintang dan sangat dipengaruhi oleh Rusia dan Komunis Cina, dipimpin oleh Wang Jingwei. Pada masa pemerintah Wuhan, Soong memiliki beberapa jabatan penting, yaitu menteri keuangan, salah satu dari 28 anggota Dewan Pemerintah, salah satu dari lima belas anggota Dewan Militer, dan anggota Dewan Politik Kuomintang (Boorman, 150).

Setelah pemerintah Nanjing berdiri, Soong menjabat sebagai menteri keuangan, direktur Bank Sentral Cina, direktur Bank Cina, serta ketua dewan komisaris Bank Cina (Zhāng Kāiyuán 章开沅, 2002: 318). Dengan pengalamannya berturut-turut sebagai menteri keuangan pemerintah Guangdong, Wuhan, dan Nanjing, serta pendiri dan Gubernur Bank Sentral Cina, Soong berperan penting dalam mendanai kebutuhan militer partainya.

Latar belakang dan kepribadian Soong sangat menentukan dalam hubungannya dengan pengusaha Shanghai. Pada awal pemerintah Nanjing, sebagai menteri keuangan, Soong mengemukakan pentingnya menjalin kerja sama dengan para pengusaha Shanghai dalam menentukan kebijakan ekonomi dan keuangan yang harus dijalankan (Tamagna, 1942: 51). Soong yang memiliki sifat

keras dan gaya bicaranya terang terangan, terlihat dengan pernyataannya yang terang-terangan terhadap media cetak. Walaupun gaya dan kepribadian Soong ini mengesankan banyak orang asing, namun hal ini membuat Soong memiliki banyak musuh di pemerintah Nanjing (Coble, 1980: 161-163). Sifat keras Soong juga terlihat melalui pendiriannya yang berlawanan dengan Chiang mengenai masalah hubungan dengan Jepang, kampanye anti-komunis, dan pengeluaran militer. Gaya politik Soong yang independen ini, membawanya untuk menggunakan pengusaha Shanghai sebagai alat untuk menekan pemerintah agar menyetujui kebijakannya. Hal ini terlihat ketika Soong mengadakan lobi dengan pengusaha Shanghai dan membentuk Liga Anti Perang Sipil untuk menentang kampanye anti-komunis Chiang Kai-shek.

Menghadapi kenyataan bahwa Ekspedisi ke Utara membutuhkan banyak sekali dana, yaitu mencapai 1.6 juta yuan setiap lima harinya (Woodhead, 1929: 635), membuat T.V Soong mulai mengubah secara drastis kebijakan pemerintah Nanjing terhadap pengusaha Shanghai. T.V Soong mulai mengurangi kebijakan kekerasan dan mulai menerapkan kebijakan kerja sama dengan para pemimpin industri, keuangan, dan perbankan Shanghai. Hal ini dilakukan T.V Soong semata-mata untuk mendapatkan dukungan pengusaha Shanghai, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dalam bidang ekonomi, T.V Soong berusaha menciptakan pasar surat obligasi pemerintah dengan menawarkan syarat-syarat pembayaran yang menguntungkan bagi pengusaha Shanghai. Dalam bidang politik, ia mulai semakin sering berkonsultasi dengan pengusaha Shanghai dalam berbagai pertemuan dan konferensi. Hal ini dilakukan T.V Soong untuk menarik para pengusaha Shanghai memasuki arena politik.

Kebijakan kerja sama semacam ini dianggap T.V Soong sebagai kebijakan jangka panjang yang lebih pasti dibandingkan kebijakan kekerasan. Menurut T.V Soong, jika pemerintah Nanjing menginginkan bantuan pengusaha Shanghai dalam membiayai pemerintah maka kebijakan kerja sama merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sikap T.V Soong yang simpati terhadap pengusaha Shanghai dapat dimengerti mengingat latar belakang kehidupannya yang sudah sangat dekat dengan pengusaha Shanghai. Ayahnya, Charles Jones Soong juga merupakan salah satu pengusaha dan industrialis di Shanghai. Di

samping itu, tujuan T.V Soong menjalankan kebijakan kerja sama dengan pengusaha Shanghai adalah untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan. Pada masa itu, T.V Soong sedang mengalami perselisihan dengan Chiang Kai-shek dan pemimpin lainnya mengenai kontrol anggaran dan pengeluaran militer. Oleh karena itu, ia mulai menggunakan pengusaha Shanghai sebagai sekutu yang potensial dalam perjuangan politiknya di pemerintahan Guomintang (Coble, 1980: 48).

Kebijakan kerja sama Soong dengan pengusaha Shanghai terlihat ketika pendirian Bank Sentral Cina. Bank Cina dan Bank Komunikasi merupakan bank pemerintah namun kedua bank ini dikendalikan sepenuhnya oleh para pemegang modal Shanghai. Ketika T.V Soong menjadi menteri keuangan pada tahun 1928, ia menuntut kekuasaan atas kedua bank ini dikembalikan kepada pemerintah. Namun, para pemegang modal Shanghai menolaknya. Daripada memaksakan kekuasaan pemerintah atas kedua bank tersebut, T.V Soong lebih memilih mendirikan bank baru, yaitu Bank Sentral Cina. Melalui kebijakan kerja samanya, Soong melakukan negosiasi dan kompromi dengan para pemegang modal Shanghai. Pengusaha Shanghai bersedia memberikan pinjaman modal untuk mendanai berdirinya bank baru tersebut dengan membeli saham bank tersebut (tidak lebih dari 49%). Kompromi juga tercapai dengan mengubah status Bank Cina dan Bank Komunikasi menjadi bank semi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menempatkan orang-orangnya di jajaran kepemimpinan Bank Cina dan Bank Komunikasi, yaitu sebanyak tiga orang dari lima belas orang direktur dari masing-masing bank tersebut (Coble, 1980: 79-81).

Selain itu, supaya mendapatkan dukungan aktif dari komunitas pebisnis Shanghai, Soong yang menjadi gubernur Bank Sentral Cina, juga memilih enam orang, baik dari sektor perbankan, perdagangan, dan perindustrian untuk menduduki posisi dewan direktur. Keenam orang ini antara lain, Wang Baolun dari Bank Zhenda, Jian Rongmin dari Bank Komunikasi, K. P. Chen dari Bank Penyimpanan dan Perdagangan Shanghai, Rong Zongjing dari Asosiasi Perdagangan Tepung, Zhou Zhongliang dari Industri Pewarnaan Kain, dan Ye Zhoudang dari sektor *real estate*. Selain itu, Soong juga memilih lima orang sebagai Dewan Pengawas Bank Sentral Cina. Kelima orang tersebut antara lain Li

Ming dari Bank Perindustrian Zhejiang, Bei Zhuyi dari Bank Cina, Yu Yajing dan Ling Ganghou dari Kamar Dagang Shanghai, serta Jin Renjing dari Bank Pertukaran Fuyuan (*The China Weekly Review*, 13 Okt. 1928, "Government Announces..."). Partisipasi komunitas pebisnis Shanghai ini memberikan Bank Sentral Cina keuangan yang solid serta koneksi yang baik dengan beberapa bank komersial.

3.2 Hubungan Pengusaha Shanghai dan Pemerintah Nanjing (1927-1933)

Pada tahun 1927-1933 yang menjadi periode awal pembangunan pada masa pemerintah Nanjing, setidaknya ada sembilan peristiwa pada tahun 1927-1933 yang dapat menjadi indikasi bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain Konferensi Ekonomi Nasional, Konferensi Keuangan Nasional, Sidang Pleno ke-5 Komite Eksekutif Pusat Kuomintang, Konferensi Pembatasan dan Reorganisasi Militer, Kongres Ketiga Partai Kuomintang, Pembubaran dan Reorganisasi Kamar Dagang Shanghai, Penjualan Surat Berharga Pemerintah, Penetapan Pajak-pajak Baru, serta Kampanye Anti Komunis dan Liga Anti Perang Sipil. Dari peristiwa-peristiwa besar tersebut dapat dilihat bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing.

3.2.1 Konferensi Ekonomi Nasional

Hal pertama yang dilakukan oleh T. V Soong dalam kebijakan kerja sama dengan pengusaha Shanghai adalah mengadakan Konferensi Ekonomi Nasional (Quánguó Jīngjìhuì 全国经济会) pada tanggal 20-30 Juni 1928. Konferensi ini dihadiri oleh para pedagang, industrialis, pakar ekonomi dan keuangan. Walaupun dikatakan sebagai konferensi nasional, sebagian besar peserta yang hadir adalah pengusaha dari Zhejiang (浙江) dan Jiangsu (江苏). Dalam konferensi ini, T.V Soong meminta maaf atas kebijakan kekerasan yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah terhadap pengusaha Shanghai. T.V Soong juga mengharapkan partisipasi pengusaha Shanghai dalam merumuskan kebijakan selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui tujuan konferensi tersebut yang dikemukakan oleh T.V Soong:

Tidak ada pemerintah yang dapat menikmati kepercayaan diri atas masyarakat kecuali jika masyarakat ikut serta dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Kami telah meminta masyarakat Cina melakukan pengorbanan yang sangat besar untuk kesuksesan tentara-tentara kita selama masa perang. Ketika perang, kami mungkin telah terpaksa mengambil jalan ... untuk mengumpulkan dana. Sekarang perang telah berakhir ... Dalam tugas rehabilitasi ini, masyarakat harus memiliki suara ... Kami memanggil bersama-sama orang-orang non-politik, perwakilan pembayar pajak, untuk mengkritik kami, untuk menolong kami, dan untuk memandu kami ... Keberhasilan ini akan menjadi sebuah langkah maju dalam kebiasaan demokrasi di Cina (Woodhead, 1929: 629).

Konferensi Ekonomi Nasional ini menyepakati lima resolusi mengenai pengurangan jumlah tentara dan pembatasan anggaran militer, peningkatan perdagangan, penglikuidasian utang nasional, pembaharuan pajak, dan pembentukan bank sentral yang kuat. Dalam resolusi mengenai pengurangan jumlah tentara dan pembatasan anggaran militer, disepakati lima hal yaitu,

- Tentara Nasional harus dibatasi hingga lima puluh divisi, masing-masing divisi terdiri dari sepuluh ribu tentara.
- Pengeluaran militer tahunan harus dibatasi hingga 192 juta *dollar*, atau sekitar dua pertiga dari total pemasukan nasional.
- Pembentukan komisi nasional oleh pemerintah pusat untuk mengawasi dan menjalankan pembatasan jumlah tentara dan anggaran militer.
- Menyediakan pekerjaan bagi para tentara, yaitu menjadi polisi atau tenaga kerja bagi proyek pembangunan.
- Pemerintah pusat harus mengeluarkan dana khusus untuk proses rehabilitasi ini.

Dalam konferensi tersebut, para pengusaha Shanghai juga menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Hal ini terlihat dalam resolusi mengenai peningkatan perdagangan. Mereka menginginkan setiap hak milik mereka yang disita atau diambil alih pemerintah, seperti kapal, kendaraan, pabrik, industri, maupun pertambangan, agar dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang yang mengatur kegiatan serikat buruh. Menurut para pengusaha Shanghai, undang-

undang ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kekacauan yang disebabkan oleh serikat buruh (Woodhead, 1929: 629-630).

Dalam resolusi mengenai utang nasional, pengusaha Shanghai menyerukan agar pemerintah pusat segera membentuk sebuah komisi khusus untuk menangani hal ini. Mengenai pembaharuan pajak, disepakati adanya pembagian yang jelas antara pemasukan nasional dengan pemasukan propinsi. Selain itu, juga dituntut adanya penghapusan pajak transit internal (Lijīn 厘金)¹. Sedangkan dalam resolusi mengenai perbankan dan mata uang, disepakati untuk mendirikan bank sentral yang kuat, mendirikan bank tingkat propinsi, pembentukan sistem perbankan yang mengatur berbagai institusi perbankan, serta penghapusan mata uang tael dan penggunaan mata uang *dollar* (Woodhead, 1929: 630-632).

Konferensi Ekonomi Nasional ini benar-benar menandai perubahan signifikan terhadap hubungan antara pengusaha Shanghai dengan Pemerintah Nanjing. Melalui konferensi ini, pengusaha Shanghai diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Di sisi lain, bagi T.V Soong konferensi ini merupakan sarana untuk mendapatkan dukungan bagi program-program yang diajukannya. Dengan dorongan dari Soong, anggota-anggota konferensi tersebut mengirimkan telegram kepada komisi urusan militer dan Chiang Kai-shek agar membatasi jumlah tentara dan anggaran militer (Coble, 1980: 50).

3.2.2 Konferensi Keuangan Nasional

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pengusaha Shanghai untuk menyuarakan aspirasi politiknya adalah mengikuti Konferensi Keuangan Nasional (Quánguó Cáizhèng Huiyì 全国财政会议). Konferensi ini diadakan di Nanjing pada tanggal 1-10 Juli 1928. Walaupun bersifat nasional, konferensi ini hanya

¹ Lijin (pajak transit internal) pada awalnya hanya diterapkan di beberapa propinsi saja untuk meningkatkan pemasukan demi penyediaan makanan bagi para tentara pada masa Gerakan Taiping. Namun seiring waktu, pemungutan lijin menyebar ke seluruh wilayah Cina. Lijin juga muncul dalam berbagai bentuk pajak, misalnya pajak komoditas dan pajak khusus. Selain itu, muncul pula 'pos-pos' sebagai tempat pemungutan lijin. Semua barang-barang yang transit dikenakan pajak lijin ini. Sedangkan untuk tingkat pajaknya berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tingkat pajak lijin bertambah besar akibat korupsi yang dilakukan oleh para pemungut pajak sehingga menimbulkan penyelundupan yang dilakukan oleh para pedagang. Oleh karena itu, pemungutan pajak lijin secara ekonomi 'tidak sehat' karena menghambat perkembangan sektor perdagangan (Chen P.T, *The China Weekly Review*, 14 Juli 1928, "The Abolition of Likin").

dihadiri oleh pejabat-pejabat keuangan tingkat propinsi (Woodhead, 632). Selain itu para peserta sebagian besar berasal dari Zhejiang dan Jiangsu. Masalah utama yang dihadapi T.V Soong adalah adanya kenyataan bahwa pemasukan pemerintah hanya berasal dari lima propinsi, yaitu Jiangsu, Zhejiang, Anhui (安徽), Hunan (湖南), dan Hubei (湖北). Selain itu, di propinsi lainnya, pejabat-pejabat setempat walaupun tidak menentang pemerintahan Nanjing, namun tidak loyal dalam transfer pemasukan ke pusat. Mereka juga cenderung menguasai pemasukan di wilayah yang mereka kuasai (Lary, 2007: 103-104). Oleh karena itu, Soong berharap melalui Konferensi Keuangan Nasional ini dapat menetapkan distribusi pemasukan yang adil, yang dapat ditransfer ke Nanjing dari setiap propinsi (Zhāng Kāiyuán 章开沅, 2002: 273-275). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Soong dalam pembukaan konferensi tersebut:

Akan menjadi tugas kita selama konferensi ini ... untuk memutuskan ... bagaimana memisahkan pemasukan dan pengeluaran nasional dan propinsi ... tanpa mengatur penguasa propinsi untuk memberikan kendali sepenuhnya kepada Menteri Keuangan atas pemasukan nasional, dan ... tanpa mengetahui pemasukan total kita yang sebenarnya, semua pembicaraan untuk menyatukan Cina ini sia-sia saja. (Woodhead, 1929: 633)

Kontrol nasional terhadap pemasukan semacam ini masih merupakan tujuan yang sulit dicapai karena peserta konferensi tersebut hanya terbatas dari propinsi Zhejiang dan Jiangsu.

Setelah penutupan konferensi, Soong segera menuju Beijing untuk menyerahkan rencana ini kepada para jenderal Guomintang. Pada saat itu Ekspedisi ke Utara telah selesai dilaksanakan sehingga merupakan kesempatan yang baik untuk menarik mundur para tentara. Selain itu, Soong juga membawa ultimatum para bankir Shanghai yang menuntut agar rencana tersebut disetujui. Jika tidak disetujui, para bankir Shanghai tidak akan memberikan uang sepeserpun kepada pemerintah Nanjing. Rencana Soong ini mendapat penolakan dari para jenderal di Beijing. Bahkan, Chiang Kai-shek memaksa Asosiasi Bankir Shanghai untuk memberikan pinjaman sebesar tiga juta yuan. T.V Soong juga dipaksa oleh

para jendral Beijing untuk mengeluarkan tiga puluh juta yuan dalam bentuk surat obligasi pemerintah (Coble, 1980: 52).

3.2.3 Sidang Pleno ke-5 Komite Eksekutif Pusat Kuomintang

Tindakan pengusaha Shanghai untuk memperjuangkan kepentingan mereka selanjutnya terjadi pada Sidang Pleno ke-5 Komite Eksekutif Pusat Guomintang di Nanjing pada tanggal 7-16 Agustus 1928. Pada sidang tersebut, Soong menjelaskan bahwa pada saat Ekspedisi ke Utara ia harus menyediakan uang sebesar 1.6 juta yuan setiap lima harinya untuk kepentingan militer. Dengan berjalan tanpa anggaran telah membuatnya menghipotikkan seluruh pajak yang penting sehingga jika programnya dalam hal penyatuan dan anggaran pajak tidak dijalankan maka Cina akan segera menghadapi kebangkrutan (Woodhead, 1929: 635-636). Selain mengemukakan pandangannya, Soong juga menyerahkan rencana yang telah disusun pada Konferensi Keuangan dan Ekonomi. Pada sidang ini, Soong mendapat dukungan dari seratus delegasi pengusaha Shanghai yang berasal dari Kamar Dagang Shanghai, Kamar Dagang Nantao dan Zhabei, Asosiasi Bankir Shanghai, serta enam puluh Asosiasi Shanghai (Coble, 1980: 51-52).

Para pengusaha Shanghai juga membawa ultimatum yang berisi bahwa mereka tidak akan memberikan pinjaman kepada pemerintah sebelum rencana yang dihasilkan pada Konferensi Ekonomi Nasional disetujui dan dijalankan. Untuk menegaskan pendirian mereka, para pengusaha Shanghai akan menahan sementara pinjaman untuk bulan Agustus 1928. Menghadapi tekanan dari Soong dan pengusaha Shanghai, Sidang Pleno ke-5 menyetujui rencana penyatuan keuangan dan menjalankan anggaran nasional. Pada tanggal 16 Agustus 1928, Komite Anggaran Nasional terbentuk. Komite ini terdiri dari Chiang Kai-shek, Feng Yuxiang (冯玉祥), Yan Xishan (阎锡山), Li Zongren (李宗仁), dan T.V Soong. Komite Reorganisasi Keuangan Pusat juga dibentuk pada tanggal 3 September 1928 untuk membantu penyatuan keuangan negara. Walaupun demikian, komite ini hanya nama belaka dan tidak berjalan sebagaimana mestinya (Woodhead, 1929: 636, 645).

3.2.4 Konferensi Pembatasan dan Reorganisasi Militer

Usulan untuk membatasi anggaran militer kembali diserukan pada Konferensi Pembatasan dan Reorganisasi Militer yang dimulai pada 15 Januari 1929 di Nanjing. Soong kembali menyerahkan rencana anggarannya. Rencana anggaran ini berisi jumlah pemasukan yang diharapkan pada tahun 1929 serta pengeluaran militer yang dibatasi hingga 192 juta *dollar*. Pada konferensi tersebut pula, komunitas pebisnis Shanghai tetap memberikan dukungan kepada Soong. Konferensi pembatasan Militer tersebut pada prinsipnya menyetujui rencana Soong (*The China Weekly Review*, "Military Conference...", 19 Januari 1929). Pada tanggal 17 Januari 1929, konferensi tersebut menerima resolusi mengenai pembatasan pengeluaran militer menjadi 192 juta *dollar*, pembatasan tentara hingga 715000 orang, dan penyatuan keuangan nasional (Woodhead, 1929: 637-641). Seperti sebelumnya rencana ini hanya disetujui dalam bentuk nominal saja tetapi tidak pernah dijalankan (Woodhead, 1929: 1197). Tidak ada satupun di antara Chiang Kai-shek, Feng Yuxiang, Yan Xishan, dan Li Zongren yang berencana untuk membatasi tentara mereka (*The China Weekly Review*, "Troop Disbandment...", 19 Januari 1929).

Usaha pengusaha Shanghai dan T.V Soong untuk mengendalikan anggaran nasional yang dimulai bulan Mei 1928 berakhir dengan kegagalan. Halangan yang paling mendasar adalah bahwa Cina yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Nanjing bukanlah negara yang benar-benar bersatu. Cina terdiri dari beberapa wilayah kekuasaan yang hanya sebatas 'pernyataan' saja mengakui Pemerintah Nanjing. Penyatuan anggaran Nasional merupakan hal yang sulit tercapai selama situasi militer internal belum stabil (*The China Weekly Review*, "Problems and Possibilities...", 12 Januari 1929). Walaupun usaha Soong mengalami kegagalan, ia telah membawa pengusaha Shanghai masuk ke dalam dunia politik. Bagi para pengusaha Shanghai, dukungan Soong membuat mereka mendapat pijakan politik di Nanjing dan untuk sementara dapat lepas dari tekanan ekonomi pemerintah. Selain itu, mereka juga semakin sadar akan kedudukan politik mereka (Coble, 1980: 54).

3.2.5 Federasi Kamar Dagang Nasional

Pada bulan Oktober 1928, Kamar Dagang Shanghai menyelenggarakan Federasi Kamar Dagang Nasional (Quánguó Shānghuì Liánhéhuì 全国商会联合会). Pertemuan ini membahas tentang kebijakan pajak untuk membantu meringankan beban pajak yang begitu berat dari pemerintah pusat. Pada tanggal 17 Oktober 1928, Kamar Dagang Shanghai memberikan petisi kepada pemerintah agar memperbolehkan lima orang perwakilannya untuk masuk dalam Legislatif Yuan. Selain itu, Kamar Dagang Shanghai juga semakin aktif menuntut pengembalian properti mereka yang telah disita oleh pemerintah. Pada bulan Oktober 1928 misalnya, Kamar Dagang Shanghai mengirim telegram kepada Komisi Pembangunan Nasional (Jiànshè Wěiyuánhui 建设委员会) yang telah menyita properti milik Perusahaan pertambangan batu bara Chang Xing yang berlokasi di Zhejiang. Mereka menyatakan bahwa penyitaan tersebut ilegal dan menuntut pengembalian properti tersebut kepada pemiliknya (Coble, 1980: 56).

Tindakan Soong dan para pengusaha Shanghai menemui kegagalan. Walaupun telah menerima ultimatum dari pengusaha Shanghai, Chiang tetap memaksa Soong untuk memberikan dana tambahan. Pada tanggal 3 Juli 1928, sebelas Bank Shanghai setuju untuk memberikan dana. Jadi, para pengusaha Shanghai tetap mengalirkan dana kepada Chiang Kai-shek. Sebelum sidang pleno kelima, pemerintah melakukan kampanye propaganda untuk menekan para bankir. Kampanye ini bertujuan untuk menekan para bankir sebelum mereka menyampaikan ultimatumnya pada Sidang Pleno ke-5. Pemerintah menuduh para bankir telah mengorbankan nasionalisme demi kepentingan pribadi (Coble, 1980: 57).

Alasan yang menyebabkan aliansi T. V Soong dengan pengusaha Shanghai menemui kegagalan adalah karena Konferensi Ekonomi Nasional yang diprakarsai oleh Soong hanya melibatkan kalangan terbatas saja. Padahal jika didasari oleh prinsip '*people's livelihood*' seharusnya konferensi ini mengikutsertakan berbagai kalangan masyarakat seperti petani dan pekerja. Apalagi konferensi ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang bersifat nasional. Jadi, apabila hanya dihadiri oleh satu kalangan saja, yaitu dari

kalangan pengusaha maka kebijakan yang dihasilkan akan bersifat sepihak. Hal ini benar-benar tidak sesuai dengan Tiga Prinsip Rakyat yang dikemukakan oleh Sun Yat-sen.

3.2.5 Kongres Ke-3 Partai Kuomintang

Perjuangan politik pengusaha Shanghai mencapai puncaknya pada Kongres ke-3 Kuomintang (Guómíndǎng dì sān cì Quánguó Dàibiǎo Dàhuì 国民党第三次全国代表大会) pada bulan Maret-April 1929. Kongres ini merupakan kongres pertama setelah hubungan Kuomintang-Komunis retak. Tujuan dari kongres ini adalah untuk menghapuskan pemikiran-pemikiran komunis dari aturan partai. Pengusaha Shanghai menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kedudukan politik di Nanjing sehingga mereka dapat berperan lebih besar dalam ekonomi nasional Cina. Sayangnya, Kuomintang masih memegang teguh ideologi partai yang didasari oleh sikap Sun yang anti kapitalis (Kongres satu partai Kuomintang tahun 1924). Karena pengusaha Shanghai ini sering diidentikkan dengan kapitalis maka sulit bagi pengusaha Shanghai untuk memiliki perwakilan bisnis dan industri di partai. Oleh karena itu, tetap tidak ada perubahan pengusaha Shanghai tetap tidak memiliki legitimasi dan perlindungan terhadap tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pemerintah (Coble, 1980: 58-59). Bahkan, Kuomintang di kota Shanghai berusaha menggunakan kongres ini untuk membubarkan Kamar Dagang Shanghai, namun usaha ini gagal (Zhào Lìdòng 赵利栋, 2002:2).

3.2.6 Pembubaran dan Reorganisasi Kamar Dagang Shanghai

Rintangannya yang dihadapi oleh pengusaha Shanghai adalah resolusi partai ketiga yang memutuskan untuk membubarkan organisasi kamar dagang di Cina, terutama Kamar Dagang Shanghai. Hal ini dilakukan untuk menghentikan para pengusaha Shanghai yang dianggap dapat menentang kekuasaan pemerintah. Komunitas pengusaha Shanghai yang terdiri dari Asosiasi Bankir Shanghai dan Asosiasi Pemilik Pabrik Kapas membuat resolusi untuk menentang pembubaran Kamar Dagang. Mereka juga mengirim delegasi, Yu Xiaqing untuk pergi ke Nanjing membela kasus mereka.

Walaupun demikian, pemerintah gagal dalam mengeliminasi Kamar Dagang Shanghai. Oleh karena itu, mereka menggunakan cara lain, yaitu menggunakan dua organisasi yang berada di bawah naungan Kamar Dagang. Kedua organisasi tersebut adalah Asosiasi Penyelamatan Negara (jiùguóhuì 救国会) dan Perhimpunan Pedagang (Shāngmín Xiéhuì 商民协会). Pada tanggal 22 April 1929 kedua organisasi ini membawa massa dan merusak gedung Kamar Dagang yang terletak di halaman tertutup Kuil Langit di Pemukiman Internasional. Dua hari kemudian gedung ini ditutup dan kegiatan usahanya dihentikan (Qiáo Zhàohóng 乔兆红, 2008: 3). Para pengusaha Shanghai yang terdiri dari Asosiasi Bankir Shanghai, Asosiasi Bankir Lokal Shanghai, serta Asosiasi Pemilik Pabrik Kapas mengirimkan telegram kepada pemerintah Nanjing untuk menghentikan Asosiasi Penyelamatan Negara dan membantu Kamar Dagang. Petisi yang disampaikan tidak mendapat respon, bahkan pemerintah melarang koran-koran untuk mencatat kejadian ini. Hal ini disebabkan karena Asosiasi Penyelamatan Negara memiliki akses pada koran Harian Pusat (Zhōngyāng Rìbào 中央日报). Selain itu, penyerangan terhadap anggota Kamar Dagang juga terus dilakukan (Coble, 1980: 61-62).

Pemerintah Nasional kemudian menyetujui rencana yang diajukan oleh Perhimpunan Pedagang untuk menggabungkan seluruh organisasi komersil di Shanghai. Penyatuan ini terdiri dari organisasi kamar dagang, Kamar Dagang Nantao dan Zhabei, dan Persatuan Pedagang. Penyatuan ini dilakukan oleh pemerintah Kuomintang untuk memperlemah kekuatan pengusaha Shanghai. Hal ini disebabkan karena Kamar Dagang Nantao dan Zhabei terdiri dari pengusaha kecil yang berada di wilayah orang Cina. Jadi, dapat dikontrol secara langsung oleh Kuomintang. Selain itu, Perhimpunan Pedagang merupakan organisasi pedagang yang dibentuk oleh anggota partai, seperti Wang Yansong (王延松) dan Luo Qinghua (骆清华). Jadi, Perhimpunan Pedagang merupakan organisasi yang dikelola dan dikendalikan oleh partai Kuomintang Shanghai. Dengan kata lain, Perhimpunan Pedagang merupakan 'produk' pemerintahan Kuomintang (Zhào Lìdòng 赵利栋, 2002: 2). Oleh karena itu, akan mudah untuk mengendalikan organisasi Kamar Dagang yang terdiri dari pengusaha besar yang berlokasi di Pemukiman Internasional. Penggabungan beberapa badan ini akan membentuk

badan yang baru yang disebut Kamar Dagang di Kotapraja Shanghai. Organisasi ini berada di bawah Kuomintang sehingga harus menaati setiap perintah dan aturan yang ditentukan Kuomintang. Selain itu, seluruh anggota organisasi ini juga dituntut untuk patuh pada Tiga Prinsip Rakyat. Menurut pemerintah Kuomintang, Kamar Dagang Shanghai harus dirombak kembali karena organisasi ini terbentuk sebelum Tentara Revolusioner Nasional tiba di Shanghai. Pada saat itu organisasi ini sering berhubungan dengan *warlord*. Di sisi lain, Perhimpunan Pedagang Shanghai dibentuk oleh pengusaha Shanghai dengan didasari oleh pemikiran Sun Yat-sen (Coble, 1980: 62-63).

Pembubaran organisasi kamar dagang merupakan kegagalan bagi pengusaha Shanghai dalam memperoleh peran politik di Nanjing. Dengan organisasinya yang baru, para pengusaha Shanghai masih dapat melakukan aktifitas di bidang ekonomi namun semakin sedikit tampil dalam bidang politik. Selain organisasi kamar dagang, Federasi Perhimpunan Dunia Perdagangan Shanghai yang terdapat di Pemukiman Internasional dan wilayah Konsesi Prancis juga dibubarkan pada bulan November 1929 (Xu Xiaoqun, 2001: 97). Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan absolut yang dilakukan oleh Kuomintang yang dapat mengendalikan setiap organisasi lokal serta menekan setiap organisasi yang tidak patuh dan menggantinya dengan organisasi lain (Xu Xiaoqun, 2001: 97-105). Hal ini juga menunjukkan bahwa pengusaha Shanghai tidak memainkan peran politik yang independen pada pemerintahan Kuomintang.

3.2.7 Penjualan Surat Obligasi Pemerintah

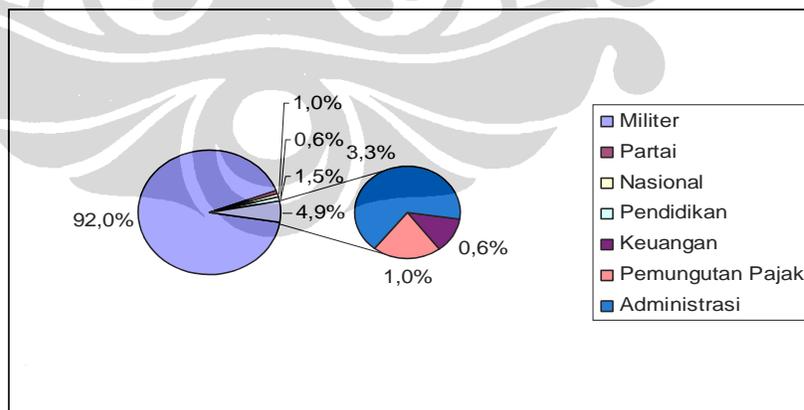
T.V Soong gagal dalam membatasi pengeluaran militer, bahkan Chang Kai Shek terus menekan Soong untuk mendapatkan dana. Sejak pemerintah Nanjing berdiri, pengeluaran pemerintahan selalu melebihi pemasukannya. Salah satu sumber pemasukannya diperoleh melalui pinjaman. Pada bulan Juni 1927 misalnya, persentase pemasukan yang berasal dari pinjaman mencapai 48.6%. Selain itu, pemerintahan Nanjing juga menanggung utang luar negeri yang sangat banyak dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintahan Nanking harus mengeluarkan 2.412.000 yuan dalam bentuk surat obligasi dari bulan Mei

1927-Januari 1937 (Coble, 1980: 66-67). Para bankir Shanghai merupakan pembeli utama dalam pasar surat obligasi ini.

Usaha pengusaha Shanghai untuk memperoleh peran politik menemui kegagalan karena pengusaha Shanghai tidak mampu mengubah posisi ekonomi mereka menjadi kekuatan politik. Walaupun demikian, dengan hubungan baik yang dimilikinya dengan para pengusaha Shanghai, Soong berhasil mengalirkan dana pinjaman tanpa mengambil jalan kekerasan. Pada tahun 1928-1931 ketika Jepang menginvasi Manchuria dan menimbulkan krisis ekonomi dan politik, Soong menciptakan pasar surat obligasi pemerintah di Shanghai. Kebijakan ini menguntungkan bagi para pemodal sedangkan tidak menguntungkan bagi para industrialis karena adanya pajak-pajak baru.

Laporan keuangan yang dikeluarkan T.V Soong menunjukkan bahwa pada bulan Juni 1927 hingga Mei 1928, 92 % dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk tujuan militer. Sedangkan, 48.6 % dari total pemasukan berasal dari pinjaman (Woodhead, 1929: 656). Setelah Ekspedisi ke Utara berakhir, situasi ekonomi lebih membaik. Walaupun demikian, pinjaman tetap berlanjut. Pengeluaran untuk militer dan pembayaran utang memakan 85% dari penerimaan pemerintah dari tahun 1929-1932. Pengeluaran militer meningkat dari tahun 1929 sebesar 210 juta yuan menjadi 312 juta yuan pada tahun 1931.

Gambar 3.1 Pengeluaran Pemerintah Nanjing Juni 1927-Mei 1928



Sumber: H.G.W Woodhead (Ed.). *The China Year Book 1929-1930*, (Tientsin, 1929), hal. 656 (telah diolah kembali)

Tabel 3.1 Persentase Pinjaman Pemerintah dari Total Pemasukan

Tahun	Total Pemasukan (juta yuan)	Total Pinjaman (juta yuan)	Persentase Pinjaman dari Total Pemasukan
1929	434.4	100.1	23.0
1930	539.0	100.9	18.7
1931	714.5	216.7	30.3
1932	683.0	130.0	19.0

Tabel 3.2 Persentase Pengeluaran Militer dari Total Pengeluaran

Tahun	Total Pengeluaran (juta yuan)	Pengeluaran Militer (juta yuan)	Persentase Pengeluaran Militer dari Total Pengeluaran
1929	434	210	48.3
1930	539	245	45.5
1931	714	312	43.7
1932	683	304	44.4

Sumber: H.G.W Woodhead (Ed.). *The China Year Book 1929-1930*, (Tientsin, 1929), hal. 338 (telah diolah kembali)

Pemerintah Nanjing juga menanggung utang yang besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran utang ini juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1929 utang yang harus dibayar mencapai 160 juta yuan meningkat menjadi 290 juta yuan pada tahun 1931. Karena itulah, T.V Soong terpaksa menjalankan kebijakan keuangan defisit. Dari tahun 1927-1931 pemerintahan Nanjing telah mengeluarkan 1042 juta yuan dalam bentuk surat obligasi. Hal ini dilakukan untuk menutupi pengeluaran yang begitu besar (Coble, 1980: 66-69).

Para bankir Shanghai memiliki bagian terbesar dari sumber penghasilan perbankan di Cina dan memegang peranan penting dalam pasar surat berharga dan pinjaman-pinjaman pemerintah. Selama tahun-tahun pertamanya, pemerintahan Nanking telah mengeluarkan 70 juta yuan dalam bentuk surat hutang. Untuk menjual surat-surat hutang ini, pemerintah telah menggunakan kekerasan dan menetapkan sumbangan. Para bankir Shanghai merasa bahwa surat obligasi ini bukanlah investasi yang aman pada tahun 1927 karena keadaan politik dan militer dalam negeri yang tidak stabil. Pada tahun 1928, ketika Soong memulai kebijakan

kerja samanya dengan pengusaha Shanghai, ia menciptakan pasar yang asli bagi surat obligasi pemerintah, yang membuatnya dapat mengalirkan dana tanpa menggunakan kekerasan. Soong mencapai tujuan ini dengan menawarkan kepada bankir Shanghai surat obligasi dengan diskon yang besar atau dengan harga rendah, yaitu mencapai 60-75% dari nilai surat obligasi tersebut ("Nánjīng Zhèngquán de Yìshí Xíngtài...", 2009: 2). T.V Soong mencoba meyakinkan para bankir Shanghai 'keamanan' dari surat obligasi pemerintah ini. Setiap pengeluaran surat obligasi ini dijamin dengan pemasukan dari sumber pajak baru, seperti pajak tambahan sebesar 2.5 %, pajak tembakau, dan pemasukan dari pajak perangko. Pajak menjamin sekitar 87.5% dari keseluruhan surat obligasi yang dikeluarkan oleh menteri keuangan dari tahun 1927-1930. Pembayaran kepada pemegang surat berharga ditangani oleh Komite Penanganan Dana Surat Obligasi (Guókùquán Jījīn Bǎoguǎn Wēiyuánhùi 国库券基金保管委员会). Komite ini bertujuan untuk menjamin pembayaran surat berharga (Coble, 1980: 70-72).

Syarat menguntungkan yang dijamin oleh T.V Soong dan jaminan yang ditawarkan oleh Komite Penanganan Dana Surat Berharga menciptakan pasar surat obligasi di Shanghai. Surat obligasi pemerintah menjadi sumber investasi utama bagi bank-bank di Shanghai. Dari tahun 1932, sekitar lima puluh dua bank komersial memiliki hampir setengah dari keseluruhan surat obligasi pemerintah, yaitu sekitar 418 juta yuan dari keseluruhannya yang berjumlah 859.7 juta yuan. Kepemilikan ini terpusat pada bank-bank komersil yang tergabung dalam Asosiasi Bankir Shanghai. Kesuksesan T.V Soong dalam membentuk pasar surat obligasi di Shanghai mengubah secara drastis hubungan antara kelompok pemegang modal di Shanghai dengan pemerintahan Nanjing. Karena bank-bank di Shanghai memiliki sekitar dua pertiga dari surat berharga pemerintah, maka para bankir berperan dalam menyokong pemerintah Nanjing. Kerja sama dengan para bankir Shanghai telah membantu mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah Nanjing. Selain itu, juga telah memperkuat pemerintah dalam mengendalikan dunia bisnis. Pasar spekulasi surat berharga pemerintah membawa bankir Shanghai semakin dekat dengan pemerintah Nanjing. Hal ini disebabkan karena pasar surat berharga sangat dipengaruhi oleh tindakan pemerintah. Oleh karena itu, para bankir Shanghai membangun hubungan yang dekat dengan pemerintah,

khususnya T.V Soong untuk mengetahui tindakan pemerintah (Coble, 1980: 73-78).

Investasi kelompok pemodal Shanghai yang cukup besar dalam bentuk surat obligasi pemerintah membuat mereka semakin terikat dengan pemerintah Nanjing dan T.V Soong. Pemodal Shanghai ini membeli surat berharga pemerintah dalam jumlah banyak karena mereka percaya kepada T.V Soong. Dengan program-programnya seperti kontrol anggaran terpusat, peningkatan pajak, dan pengurangan pengeluaran militer, Soong merupakan jaminan bahwa pemerintah dapat membayar surat-surat berharga tersebut kepada pemodal Shanghai. Walaupun demikian, karena masalah politik dan ekonomi, Soong tidak bisa mengurangi pengeluaran negara dan menyeimbangkan anggaran. Perselisihan antara Chiang Kai-shek dan Feng Yuxiang serta Yan Xishan misalnya, memaksa Soong untuk meningkatkan pengeluaran militer. Oleh sebab itu, pasar surat obligasi menjadi menurun. Ketidakmampuan Soong dalam menjalankan program fiskal yang sudah ditetapkan menyebabkan keraguan di kalangan pemodal Shanghai mengenai 'keamanan' dari surat obligasi.

Masalah politik lain yang mempengaruhi pasar surat obligasi adalah pertentangan antara pemerintah Nanjing dengan grup Canton. Grup Canton menuduh bahwa surat berharga pemerintah hanyalah cara yang digunakan oleh pemerintah Nanjing untuk mendapatkan uang demi kepentingan militer. Oleh karena itu, Grup Canton memaksa diadakannya likuidasi terhadap surat berharga tersebut. Selain itu, Chiang Kai-shek dipaksa untuk meninggalkan jabatannya. Chiang Kai-shek terpaksa berkompromi dan meninggalkan kedudukannya karena pada saat itu juga terjadi penyerangan terhadap Manchuria oleh Jepang. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Grup Canton, dalam hal ini Sun Ke, tidak dapat bertahan lama karena ketidakmampuan Sun Ke untuk meningkatkan pemasukan negara. Sun Ke hanya bisa mengumpulkan enam juta yuan setiap bulannya. Padahal pengeluaran militer mencapai enam belas juta yuan setiap bulannya. Selain itu, para pengusaha Shanghai juga tidak mau memberikan bantuan kepada Sun Ke karena tindakan Sun Ke sebelumnya terhadap surat obligasi sehingga membuat pemerintahan yang baru semakin terpuruk. Setelah bertahan selama tiga minggu, Sun Ke mengembalikan jabatannya kepada Chiang

Kai-shek dan posisi menteri keuangan dipegang kembali oleh T.V Soong (Coble, 1980: 86-103).

3.2.8 Penetapan Pajak-pajak Baru

Pengusaha Shanghai, baik dari sektor perbankan, perdagangan, maupun perindustrian merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah Nanking. Sektor perbankan merupakan sektor utama yang menyediakan pinjaman kepada pemerintah. Sedangkan, sektor perindustrian 'menyediakan' dana secara langsung melalui bea cukai, pajak, dan pungutan-pungutan terhadap produksi dan perdagangan mereka. Jika para pemodal Shanghai mendapatkan keuntungan dari surat berharga dan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah, maka para industrialis Shanghai merasa terbebani dengan adanya pajak-pajak baru yang ditetapkan pemerintah.

Pada bulan Januari 1928, Soong mengkonsolidasikan pajak-pajak baru yang akan dipungut di tempat produksi untuk menggantikan pajak lijin yang akan dihapus pada bulan Oktober 1930. Di tingkat distrik, pengaruh pemerintah tidak cukup kuat sehingga pajak lijin masih diberlakukan. Hal ini semakin membebani para industrialis Shanghai. Selain itu, firma asing mampu memaksa pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Salah satu perlakuan khususnya adalah dengan pengurangan total pajak dengan membayar secara tunai di muka. Akhirnya banyak industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan firma asing (Wright, 1991: 657).

Walaupun demikian, pemerintah Nanjing juga memberikan bantuan kepada sektor perindustrian dan perdagangan. Menteri perindustrian, Kong Xiangxi (孔祥熙) mensponsori Konferensi Industri dan Perdagangan Nasional untuk membahas mengenai promosi produk dalam negeri, pengembangan teknologi industri, dan peningkatan ekspor. Selain itu, Biro Shanghai untuk Masalah-masalah Sosial pada bulan Agustus 1931 memberikan bantuan dalam bentuk surat obligasi kepada industri sutra di Shanghai. Pemerintah juga menerapkan program-program yang berguna bagi perindustrian yaitu *Industrial Encouragement Act* pada bulan Juli 1929, *the Company Law* pada bulan Desember 1929, dan *the*

Trademark Law pada bulan Juni 1930 (*The China Critic*, “The Nationalist in 1928”, 3 Januari 1929).

Di satu sisi para industrialis Shanghai mendapatkan keuntungan dengan berdirinya pemerintahan di Nanjing. Keuntungan tersebut antara lain berupa berkurangnya ancaman dari pihak komunis dan serikat pekerja menjadi dikeang. Selain itu, para industrialis Shanghai juga mendapatkan keuntungan dari program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan perindustrian. Walaupun demikian, penetapan pajak-pajak baru dan sikap pemerintah yang memberikan hak yang istimewa terhadap firma asing memberikan beban yang besar bagi para industrialis Shanghai (Coble, 1980: 81-85).

3.2.9 Kampanye Anti Komunis dan Liga Anti Perang Sipil

Pada tanggal 18 Januari 1932, terjadi insiden Shanghai yang melibatkan penduduk Cina dan Jepang. Selain itu pada tanggal 28 Januari 1932, tentara Jepang menyerang wilayah Zhabei di Shanghai. Peristiwa-peristiwa ini membuat usaha dan bisnis di kota tersebut terhenti. Banyak industri, toko, dan bank lokal di Zhabei dihancurkan (So Wai Chor, 2002: 222-224). Berhentinya aktivitas ekonomi di Shanghai berpengaruh cukup signifikan terhadap pemasukan pemerintah. Oleh karena itu, Soong mulai menerapkan program keuangan yang diperketat. Pengeluaran diperkecil dengan memotong gaji seluruh pejabat pemerintah, mulai dari menteri hingga tentara. Program keuangan yang diperketat ini juga memaksa Soong untuk menurunkan bunga surat obligasi pemerintah dan memperpanjang periode pembayarannya.

Setelah melalui diskusi dengan Asosiasi Pemegang Surat Berharga Domestik, maka pada tanggal 26 Februari 1932, para pemegang Surat berharga tersebut setuju dengan keputusan pemerintah. Walaupun demikian mereka mengajukan tiga syarat yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Pertama, pemerintah harus memberikan laporan keuangan nasional di depan publik dan mengizinkan perwakilan organisasi publik untuk turut serta dalam Komite Keuangan Nasional (Quánguó Cáizhèng Wěiyuánhui 全国财政委员会). Kedua, pemerintah tidak boleh mengumpulkan uang dari organisasi komersil untuk mendanai perang sipil. Dan ketiga, pemerintah harus memberikan pernyataan bahwa pengusaha Shanghai

telah berkorban demi kepentingan nasional. Selain itu, di masa yang akan datang pemerintah tidak akan mengubah kesepakatan mengenai surat obligasi. Walaupun demikian, pengusaha Shanghai kembali mengalami kekecewaan. Hal ini disebabkan karena dari 37 perwakilan yang ada dalam Komite Keuangan Nasional, hanya sebelas yang berasal dari perbankan, bisnis, dan industri, sedangkan sisanya didominasi oleh pemimpin militer dan pejabat pemerintah. Dapat dilihat bahwa periode antara bulan September 1931-Februari 1932 merupakan bencana politik dan finansial bagi para bankir Shanghai (Coble, 1980: 103-109).

Kesuksesan T. V Soong dalam menjalankan program keuangan yang diperketat juga tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan karena kebijakan Chiang Kai-shek, dalam hal kampanye anti komunis, memaksa Soong untuk meningkatkan pengeluaran. Chiang Kai-shek lebih memilih menyelesaikan masalah internal (memusnahkan komunis) daripada pertahanan melawan Jepang. Diana Lary dalam bukunya yang berjudul *China's Republic* menulis tentang sikap Chiang terhadap invasi Jepang seperti berikut ini:

Chiang Kai-shek kelihatannya terkesima oleh tekanan Jepang yang tidak berbelas kasihan. Ia tidak berniat melawan Jepang; ia telah menyelesaikan pendidikan militernya di Jepang ... Ia mengagumi dan menghormati Jepang. Sekarang ia tidak mampu melawan tekanan mereka ... Seseorang yang tidak memiliki keberanian untuk melawan Jepang, begitu terobsesi dengan Komunis sehingga ia lebih memilih berperang dengan mereka [komunis] daripada Jepang. (Lary, 2007: 99)

Chiang dengan menggunakan metafor tubuh manusia, menggambarkan Cina sedang mengalami dua macam penyakit. Penyakit pertama adalah penyakit kulit (berasal dari luar) yaitu invasi Jepang. Penyakit ini mudah disembuhkan. Penyakit yang kedua adalah penyakit dalam yaitu masalah internal Cina. Penyakit ini harus secepatnya disembuhkan (Lary, 2007: 105). Berdasarkan pandangan semacam inilah Chiang lebih mengutamakan penyelesaian masalah dengan Komunis. Prinsip Chiang adalah “rángwài bì xiān ānnèi 攘外必先安内” (masalah yang di dalam harus dibereskan terlebih dahulu, sebelum menyelesaikan masalah yang di luar). Oleh karena itu, Chiang sering melakukan penyerangan terhadap

komunis. Dari tahun 1929-1933, setidaknya ada empat kali upaya Chiang untuk menghancurkan komunis, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kampanye Anti Komunis ini tentu saja memakan biaya yang sangat besar.

Tabel 3.3 Tindakan Militer Internal Kuomintang pada tahun 1929-1933

Tahun	Target	Hasil
1929	Klik Guangxi	Dikalahkan sementara
1930	<ul style="list-style-type: none"> • Feng Yuxiang • Yan Xishan 	<ul style="list-style-type: none"> • Feng dapat dikalahkan • Yan melarikan diri
1931	Komunis (pengepungan pertama)	Gagal
1932	Komunis (pengepungan kedua dan ketiga)	Gagal
1933	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberontak Fujian • Komunis (pengepungan keempat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberontakan dapat dihentikan • Gagal

Sumber: Diana Lary, *China's Republik*, (Cambridge, 2007), hal. 100 (telah diolah kembali)

Soong sendiri memiliki prinsip yang berlawanan dengan Chiang. Ia menganggap pertahanan wilayah utara Cina (Manchuria) dari serangan Jepang lebih penting daripada kampanye anti komunis. Perbedaan pendapat inilah yang membuat Soong lebih memilih meninggalkan jabatannya pada tanggal 4 Juni 1932. Walaupun demikian, setelah melalui negosiasi dengan Wang Jingwei, Soong bersedia kembali menjabat sebagai menteri keuangan. Setelah menjabat kembali, Soong mengatakan bahwa tidak akan ada surat obligasi yang dikeluarkan untuk mendanai kampanye anti komunis. Pemasukan akan ditingkatkan melalui peningkatan pajak garam dan sumber lainnya. Dalam pertentangannya dengan Chiang Kai-shek, Soong juga mendapatkan dukungan dari pengusaha Shanghai untuk membatasi dana untuk kampanye anti komunis.

Kamar Dagang Shanghai, Asosiasi Kamar Dagang Nasional, Asosiasi Bankir Shanghai, serta Asosiasi Bankir Lokal Shanghai membentuk Liga Anti Perang Sipil. Perang sipil selama empat lima tahun terakhir tidak akan terjadi tanpa bantuan dana dari pebisnis Shanghai yang membeli surat obligasi pemerintah. Namun, sekarang para anggota Liga tersebut menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah. Sekitar lima puluh delegasi memberikan penolakan terhadap semua surat obligasi pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan

perang sipil. Tidak ada satupun asosiasi perbankan maupun perbankan lokal yang bersedia memberikan uang kepada pemerintah untuk konflik domestik. Liga ini merupakan badan politik terbesar yang dimiliki oleh pengusaha Shanghai selama pemerintahan Nanjing. Walaupun demikian, liga ini tidak menghasilkan resolusi apapun dan kemudian tidak terdengar lagi kabarnya. Penyebab utamanya adalah keanggotaan pemimpin Gerombolan Hijau, Du Yuesheng, dalam jajaran kepemimpinan liga ini. Keberadaan Du Yuesheng dalam liga ini mencegah para pengusaha Shanghai untuk menentang pemerintah. Kegagalan Liga Anti Perang Sipil menunjukkan betapa terbatasnya peran politik pengusaha Shanghai. Kekuasaan Chiang sangat besar sehingga mampu menekan setiap tindakan pengusaha Shanghai yang dianggap berbahaya.

Soong memang mendapatkan pemasukan tambahan melalui peningkatan pajak garam namun bagian terbesar dari pinjaman tetap berasal dari bank-bank Shanghai. Soong tetap merasa keberatan dengan kebijakan Chiang yang menjalankan kampanye anti komunis. Menurut Soong, seharusnya prioritas utama haruslah pertahanan terhadap serangan Jepang. Kebutuhan untuk pertahanan terhadap serangan Jepang memaksa Soong untuk kembali bergantung pada surat obligasi pemerintah sebagai sumber pemasukan. Dalam hal ini, Soong mendapat dukungan yang kuat dari pengusaha Shanghai baik dalam hal mengeluarkan surat obligasi yang baru dan kebijakannya yang anti Jepang. Pada tanggal 25 Juni 1933, Kamar Dagang Shanghai memberikan petisi kepada pemerintah Nanjing untuk bertindak terhadap hilangnya wilayah Manchuria di sebelah utara Cina. Usaha Soong kembali gagal. Chiang Kai-shek, Wang Jingwei memutuskan untuk mengadakan peredaan ketegangan dengan Jepang untuk mencegah meluasnya perang. Selain itu, Wang Jingwei juga menandatangani Gencatan senjata Tangku pada tanggal 31 Mei 1933 yang menyerahkan seluruh propinsi Hebei kepada Jepang (So Wai Chor, 2002: 224-227). Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi Soong sehingga ia memutuskan meninggalkan Cina pada tanggal 18 April menuju Eropa dan Amerika (Coble, 1980: 110-124).

Tabel 3.4 Agresi Jepang di Cina pada tahun 1928-1933

Tahun	Tindakan Jepang
1928	Insiden Jinan
1931	Insiden Shenyang
1932	Penyerangan Shanghai
1933	Rehe berada di bawah kekuasaan Jepang

Sumber: Diana Lary, *China's Republik*, (Cambridge, 2007), hal. 98 (telah diolah kembali)

Selama perjalanannya ke luar negeri, T.V Soong merancang program ekonomi yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Cina dan mengurangi pengaruh ekonomi Jepang di Cina. Elemen penting dalam program ini antara lain, menghentikan perlakuan tarif khusus terhadap Jepang. Selain itu, juga membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang dibiayai oleh pinjaman dari Amerika. Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing non-Jepang di Cina sehingga dapat membatasi serangan ekonomi Jepang. Jepang memandang tindakan Soong ini sebagai ancaman dan memaksa Chiang Kai-shek dan Wang Jingwei untuk memberhentikan Soong. Pada tanggal 25 Oktober 1933, Soong mengundurkan diri sebagai menteri keuangan dan wakil presiden eksekutif yuan. Menanggapi pengunduran diri Soong, sebagian besar pengusaha Shanghai mengirimkan telegram kepada pemerintah Nanjing menolak pengunduran diri Soong. Peristiwa ini membuat pasar surat berharga menjadi tidak stabil.

Pengunduran diri Soong menjadi kekalahan yang besar bagi pengusaha Shanghai. Hal ini disebabkan karena Soong telah membangun hubungan yang erat dengan para pemimpin keuangan, komersial, dan industri Shanghai. Dapat dilihat bahwa sejak tahun 1931-1933, pengusaha Shanghai telah banyak mengalami kekalahan politik. Surat obligasi yang dibeli oleh pengusaha Shanghai telah mengalami penurunan nilai karena krisis politik pada tahun 1932. Selain itu, ketidakmampuan Soong dalam menjalankan program fiskalnya, ketidakmampuan Liga Anti Perang Sipil untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, serta kesuksesan Jepang dalam menghalangi Soong dalam menjalankan kebijakan anti Jepangnya membuat pengusaha Shanghai mengalami kekalahan politik (Coble, 1980: 124-139).